

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) OLEH
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyesunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SUCI INDAH LESTARI
NPM:147310566

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 65/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Suci Indah Lestari**
N P M : 147310566
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Kampar.

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr.H.Panca Setyo Prihatin.S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Andriyus.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Agung Wijaksono.,MPA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4.A r s i p -----sk.penguji-----




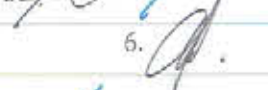


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 07/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Februari 2019 jam 11.00 - 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Suci Indah Cestari
NPM : 147310566
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
Nilai Ujian : Angka : "83,48" ; Huruf : " A _"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Februari 2019

An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



18/2011

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/15838
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1894/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 21 November 2018 dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SUGIINDAH LESTARI |
| 2. NIM / KTP | : 147310566 |
| 3. Program Studi | : ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR. |
| 7. Lokasi Penelitian | : KABUPATEN KAMPAR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2018/938

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/15838 tanggal 26 November 2018, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SUCI INDAH LESTARI |
| 2. NIM | : | 147310566 |
| 3. Universitas | : | UIR |
| 4. Program Studi | : | ILMU PEMERINTAHAN |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 27 November 2018

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi. Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kab. Kampar di Bangkinang Kota
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suci Indah Lestari
NPM : 147310566
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK
Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 04 Maret 2019
An. Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA


Syaprianto, S.Sos., M.I.P

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Suci Indah Lestari
NPM : 147310566
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabuapten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota,

Anggota,


Andriyus, S.Sos., M.Si


Dr. Khairul Rahman, S.sos, M.Si

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 14 /UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas, No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur, dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- | | | |
|----|-----------------|---|
| I | Nama | : H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M. Si |
| | NIP/NPK | : 12DK0402498 |
| | Pangkat/Jabatan | : III/c – Lektor |
| | Kedudukan | : Pembimbing I |
| II | Nama | : Andriyus, S.Sos., M.Si |
| | NIP/NPK | : 13DK0802534 |
| | Pangkat/Jabatan | : III/c – Lektor |
| | Kedudukan | : Pembimbing II |
- Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Suci Indah Lestari |
| NPM | : 147310566 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Judul Skripsi | : Peran Dinas Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kampar. |
2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada Tanggal : 20 Januari 2018
An. Dekan

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

- Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi IP
 3. Yth. Ka. Labor IP
 4. A r s i p. --SK Pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Suci Indah Lestari
NPM : 147310566
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten
Kampar


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan subbab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Pembimbing II


H. Panca Setyo Prihatin, S.JP., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.JP., M.Si

ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

SUCI INDAH LESTARI

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prose pemberdayaan usaha mikro kecil di kabupaten kampar, serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ddalam pemberdetaan masyarakat uasah mikro kecil dalam penelitian ini menggunakan terori dari Ginanjar Kartasasmita yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu, pemungkinan adalag menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyrakat untuk berkembang, pengutan adalah memberikan memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri, perlindungan harus melindungi msyrakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil. Kepala bagian pemberdayaan UMK, kepala seksi pemberdayaan, pengembangan, promosi dan peluang usaha serta pelaku usaha mikri kecil di kabupaten kampar. Dan keseluruhan populasi tersebut dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sensus. Pengumpulakn data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dan selanjutnya melakukana wawancara , dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik persentase untuk mengetahui seberapa banyak tanggapan responden yang menyatakan baik. Cukup baik, dan kurang baik, berdasarkan penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil oleh dinas perdagangan koperasi dan UMK kabupaten kampar berada pada katagori “Cukup Baik” hal ini sesuai dengan tanggapan dan pernyataan dari para responden penelitian

**EMPOWERMENT ANALYSIS OF SMALL MICRO BUSINESS BY THE
MINISTRY OF COOPERATIVE TRADE AND SMALL MICRO BUSINESS
KAMPAR DISTRICT**

ABSTRAK

SUCI INDAH LESTARI

Keywords: Community Empowerment, Possibility, Strengthening, Protection

The purpose of this study was to find out and explain how the process of empowering small micro-enterprises in Kampar district, and to find out the obstacles that occur in the small-scale community information in this study using the theory from Ginanjar Kartasasmita which states that empowerment can be seen from three sides, namely, it is possible to create an atmosphere or climate that allows the community to develop, empowering is to provide knowledge that is owned by the community in order to solve problems and meet their needs independently, protection must protect weak people from being oppressed by strong groups so as to eliminate all forms of discrimination and domination. The population in this study were the heads of trade offices, cooperatives and small micro businesses. Head of the UMK empowerment section, head of the empowerment, development, promotion section and business opportunities as well as small micro business actors in the Kampar district. And the entire population is sampled using census techniques. Collecting data is done by disseminating questionnaires and then conducting interviews, documentation. Then analyzed using percentage techniques to find out how much the respondent's response stated good. Good enough, and not good, based on the research, it was concluded that the community micro small business empowerment activities by the cooperative and MSE trade offices in the kampar district were in the category of "Good Enough" this was in accordance with the steps and statements of the research respondents.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Tentunya selama penyusunan skripsi ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau, tidak sedikit bantuan, dorongan dan semangat yang penulis terima baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.si dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing dengan ketulusan hati dan kesabarannya yang telah banyak

membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang turut membantu dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
6. Secara Khusus penulis persembahkan terutama untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang, adik-adik serta seluruh keluarga besar tercinta, atas segala kasih sayang, perhatian, dorongan, bantuan baik moril maupun materil dan do'a restu yang tidak ternilai harganya.
7. Kepada seluruh sahabat dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberi dukungan dan membantuk memberi pencerahan terhadap penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Akhir kata penulis mengucapkan selamat membaca dan semoga materi yang ada dalam makalah ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,9 Januari 2019

Penulis

Suci Indah Lestari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	21
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan pemerintah	21
2. Konsep peran	23
3. Konsep Organisasi	25
4. Konsep manajemen	27
5. Konsep manajemen sumber daya manusia	30
6. Konsep Pengembangan sumber daya manusia	32
7. Konsep pemberdayaan masyarakat	34
8. Konsep usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	40
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Pikir	46
D. Hipotesis	47
E. Konsep Operasional	47
F. OPERASIONAL VARIABEL	49
G. Teknik Pengukuran	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Populasi dan Sampel	56
D. Teknik Penarikan Sampel	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
1. Data Primer	59
2. Data Skunder	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Teknik Analisis Data	61

H. Jadwal Waktu Kegiatan	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	63
1. Keadaan Geografis.....	64
2. Penduduk.....	67
B. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.....	67
1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kecil.....	68
2. Fungsi dan Tugas Kepala Dinas.....	69
3. Fungsi dan Tugas Bidang Pemberdayaan UMK.....	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Responden	73
1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	73
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	75
3. Usian Responden.....	76
B. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar.....	78
1. Pemungkinan (enabling)	79
2. Penguatan (empowering)	83
3. Perlindungan (protecting).....	89
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

ISI	Hal
Tabel. I.1 : Jenis Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kampar	13
Tabel. I.2 : Jenis-Jenis pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar	14
Tabel. I.3 : Daftar nama-nama UKM yang mendapatkan bantuan dana pada tahun 2017.....	17
Table II.I : Operasional variable penelitian tentang Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Kampar. ... 44	44
Table III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai pada Dinas Koperasi UMKM Kabuapten Kampar dan Masyarakat UKM Kabupaten Kampar.	58
Table V.1 : Klasifikasi Responden menurut jenis kelamin.....	74
Tabel V.2 : Klasifikasi Responden menurut pendidikan.....	75
Tabel V.3 : Klasifikasi Responden menurut Usia.....	76
Tabel V.4 : Tanggapan Responden Msyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (enabling) yang akan di analisis	80
Tabel V.5 : Tanggapan Responden Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator penguatan (empowering) yang akan di analisa	84
Tabel V.6 : Tanggapan Respoden Masyarakat PELaku Usaha Mikri Kecil Kabupaten Kampar dari Indktor perlindungan (protecting) yang akan di analisis	89
Tabel V.7 : Hasil Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK mewakili Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Bapak Purwadi, S.P ., M.Si Mengenai Pemberdayaan UMK Kabuapten Kampar.	95
Tabel V.8 : Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala BIdang Pemberdayaan UMK Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, Bapak Ibrahim, S.Pd ., M.Si mengenai Pemberdayaan Masyarakat UMK Kabuapten Kampar.	98

Tabel V.9 : Hasil Wawancara dengan ibuk Kepala Seksi Pmeberdayaan Pengemangan, Promso dan Peluang Usaha Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, Ibuk Elli Yudia, S.E mengenai Pemberdayaan Msyarakat UMK Kabupaten Kampar.

..... 101

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar..... 103



DAFTAR GAMBAR

ISI

Hal

Gambar I.1 : sturuktur organisasi Dinas perdagangan koperasi dan umk daerah Kabupaten
Kampar 8

Gambara II.I : Kerangka Pikiran Peran Dinas UMKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Menengah di Kabupaten Kampar.....46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintahan daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang termasuk kedalam urusan pemerintahan konkurent yang wajib begitupun dengan Koperasi, Usaha kecil dan menengah.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, dan Menengah pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa hakekatnya pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan local.

Oleh karena itu, salah satu bentuk dari pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara untuk menunjang perekonomian didaerah tersebut dengan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Kampar dimana Dinas tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha yang akan di kelola oleh masyarakat tersebut. Menurut peraturan bupati Kampar nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil.

Disini penulis mengambil Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian, Sebagai salah satu Kabupaten nomor 3 terluas di provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.707,64 km² atau sama dengan 12,3 % dari luas provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki penduduk ± 534.050 jiwa. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Bangkinang Kota, Bangkinang barat, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, Kampar Kiri

Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kampar Kiri Tengah, Kampar kiri, Kamapar Timur, Kampar Utara, Kampar, Kota Kamapar Hulu, Perhentian Raja, Rumbio jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Tapung, dan XIII Koto Kampar.

Menurut Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan kecil. Dengan salah satu acara nya yaitu dengan melakukan pemberdayaan serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal tersebut tertera pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 Bab II Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 ayat (6) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Adapun tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK UMKM Kabupaten Kampar adalah :

1. Kepala Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikri kecil.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro

- b. Menyusun program rencana pembangunan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- c. Melakukan pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- e. Melakukan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- f. Melakukan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- g. Memfasilitasi sumber- sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha.
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan sumberdaya manusia Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan dan organisasi.
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang pemberdayaan UMKM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan, pengembangan peluang usaha mikro kecil produksi serta pemasaran produk UMK.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan UMK melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan bidang - bidang pengembangan dan produksi pemasaran UMK.
- b. Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keuangan UMK.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UMK.
- d. Melakukan koorDinasi dalam rangka meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber permodalan dan pematapan struktur permodalan UMK, usaha dan peluang Usaha UMK.
- e. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UMK dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazaskan kesetaraan.
- f. MengkorDinasi, menyelenggarakan promosi terhadap produk unggulan UMKM
- g. Meningkatkan akses pangsa pasar dan teknologi tepat guna bagi UMK.
- h. Menyusun pendataan UMK dan restrukturisasi usaha.
- i. Melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK,
- j. Meningkatkan akses fasilitas, pembiayaan dan permodalan UMK
- k. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi UMK untuk sentra-sentra UMK untuk membentuk lembaga usaha menjadi koperasi.
- l. Membantu penataan pembukuan sederhana terapan pada UMK dalam menjalankan usaha yang akuntable
- m. Menyiapkan data-data klaster UMK sesuai aset dan omset yang tercapai sesuai aturan yang berlaku.
- n. Melaksanakan dan memimpin rapat-rapat staf.
- o. Membuat laporan palakasana tugas dibidangnya kepada kepala Dinas.

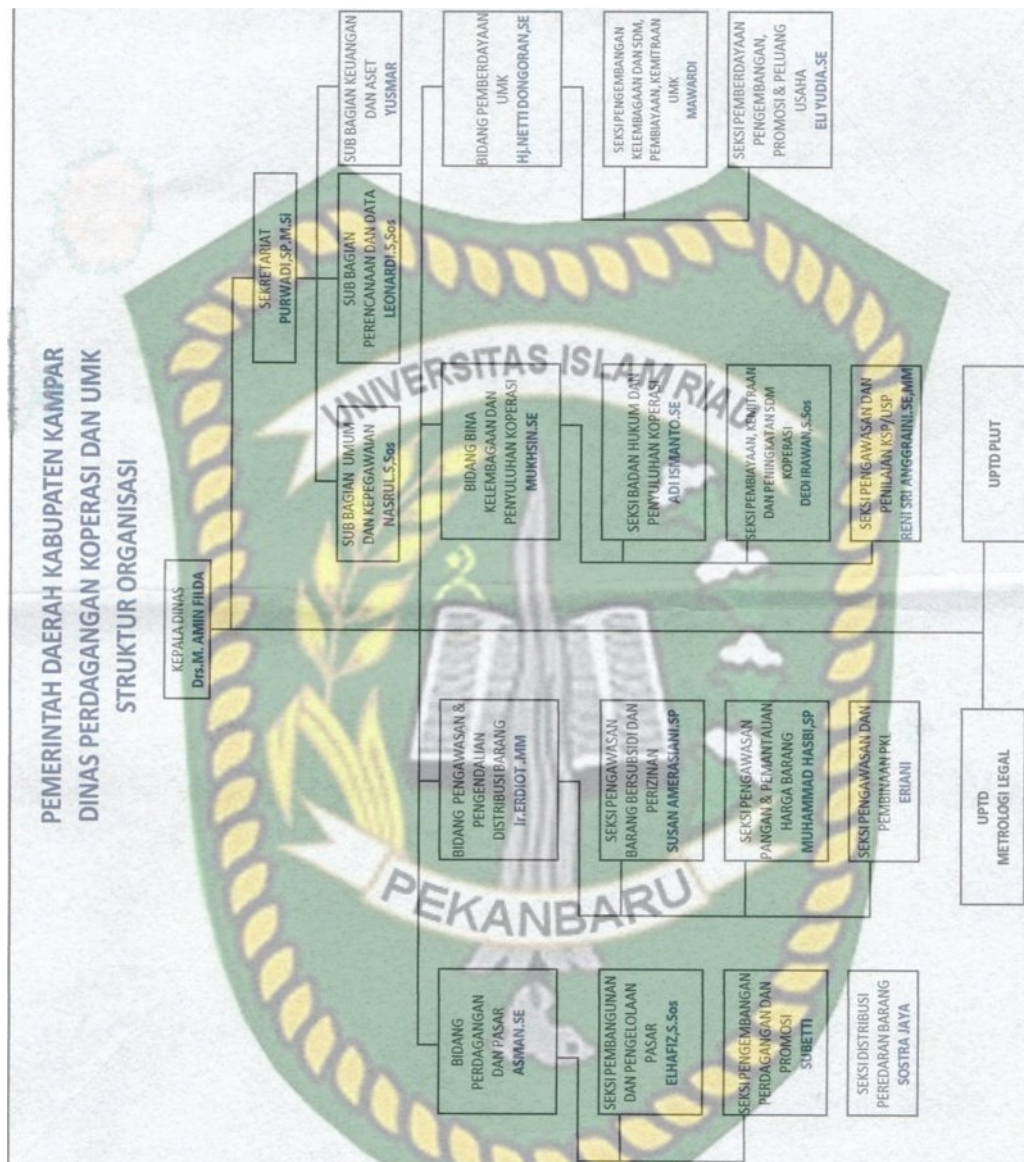
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi Kabupaten Kampar yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang perdagangan dan pasar
- d. Bidang pengawasan dan pengendalian
- e. Bidang kelembagaan dan pemyuluhan koperasi
- f. Bidang pemberdayaan UMK
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)



Gambar I.1 : sturuktur organisasi Dinas perdagangan koperasi dan umk daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Dari uraian Tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK diatas dapat dilihat bahwa Dinas menjalankan pemberdayaan kepada pelaku UMK dimana pemberdayaan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan UMK yang salah satu tugasnya yaitu

memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keuangan UMK serta melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengamsusikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan tercipta dalam relasi social.karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal ini:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Oleh karena itu, salah satu bentuk dari pemberdayaan yang diberikan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara untuk menunjang perekonomian didaerah tersebut maka melalui Usaha Mikro Kecil yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dimana Dinas tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha yang akan dikelola oleh masyarakat tersebut.

UMK bergerak diberbagai sector ekonomi (petanian, peikanan, peternakan , industry, perdagangan dan jasa). UMK juga dapat dikelompokkan atas kalsifikasi pra usaha, usaha

berjalan dan usaha maju. Oleh Karen itu, perlu adanya upaya pemetaan/klaster potensi UMK binaan sesuai dengan kondisi wilayah/administrative, potensi sumber daya (komoditas) dan unit bisnisnya (sentra produksi dan kelompok) dapat dijadikan indicator dan tolak ukur bagi pembinaan, pengembangan dan pengawasannya, agar menjadi punggung dan memperkokoh struktur perekonomian.

Ada beberapa criteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

1. Criteria Usaha Mikro adalah sebgai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Criteria Usaha Kecil adalah sebgai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memilki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Criteria Usaha Menengah adalah sebgai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha; atau



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia akan tetapi kesempatan, kemampuan dan perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal, hal tersebut mempengaruhi kesempatan dan perkembangan terhadap UMK, salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi adalah kebijakan yang ada pada saat ini belum menjamin seutuhnya mengenai pemberdayaan UMK tersebut.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah pemberdayaan memiliki prinsip, sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensial daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan penegandalian secara terpadu.

Sebagaimana prinsip pemberdayaan yang dimuat dalam UU No 20 tahun 2008, pada prinsipnya pemberdayaan dilaksanakan agar tumbuhnya kemandirian pada masyarakat UMK, serta diharapkan masyarakat UMK dapat mengembangkan usaha yang berbasisi potensial yang dapat menunjang pendapatan daerah serta menyeimbangkan perekonomian nasional, sebagaimana tujuan pemberdayaan yang dimuat dalam UU No 20 tahun 2008, yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kabupaten Kampar memiliki jumlah dan jenis Usaha Mikro dan Kecil yang sangat beragam, namun pada penelitian ini penulis akan berfokus terhadap Usaha Mikro, Adapun untuk melihat Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel I.I: Jenis Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kampar

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1.	Keripik Nenas	16
2.	Lopak Bugi	24
3.	Pembibitan	28
4.	Pengolahan Ikan	12
5.	Kuliner	26
6.	Olahan Madu	3
7.	Kerajinan	18
JUMLAH		127

Sumber: Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK dan UMKM Kabupaten Kampar

Dilihat dari table diatas, dapat dijelaskan Usaha Mikro terdapat 5 jenis usaha UMK yang ada di Kabupten Kampar, dimana jenis industry Keripik Nenas terdapat 16 usaha, Lopak bugi terdapat 24 usaha, Pembibitan 28 usaha, Pengelolahan Ikan terdapat 12 usaha, Kuliner 26 usaha, olahan madu terdapat 3 usaha, dan kerajinan terdapat 18 usaha, secara keseluruhan jumlah UMK yang berada di Kabupaten Kampar adalah 127 jenis usaha Mikro yang tersebar di 21 kecamatan.

Sedangkan untuk melihat jenis-jenis pelatihan bagi Pelaku Usaha UMK di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table I.2: Jenis Pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Jenis UMK	Keterangan
1	2	3	4	6
1	2015	Cara membidik peluang usaha dan studi kelayakan usaha	25	
		Pembentukan kelompok sawadaya masyarakat sebagai basis UMKM di kabupaten Kampar	25	
		Akses pembiayaan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah	25	
		Bisnis model kanvas	25	
		Bimbingan teknologi tepat guna budidaya jeruk manis organik	25	
		Desain kemasan	25	
		Pembuatan bolu komojo anela rasa	25	
		Kegiatan penerapan teknologi tepat guna teknik budidaya belut di lahan yang sempit dengan media drum	25	
2	2016	Tidak ada kegiatan		
3	2017	Sosialisasi kegiatan PKBL dan CSR dari PT. Telkom	40	
		Sosialisasi standar akuntansi keuangan bagi koperasi	10	
		Pelatihan desain kemasan produk UMKM	10	
		Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM	10	
		Pemasaran berbasis online	10	
		Manajemen keuangan untuk UMKM	10	
		Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP dan EMKM	50	
		Sosialisasi strategi marketing dan program jaminan social	40	

		ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM Kab. Kampar.		
4	2018	Bimbingan teknis peningkatan kualitas produk KUMKM bidang produksi	20	
		Bimbingan teknis peningkatan produksi KUMKM bidang pemasaran	20	
		Bimbingan teknis peningkatan kualitas produksi KUMKM bidang pemasaran	20	
		Bimbingan teknis peningkatan produksi KUMKM bidang pembiayaan	20	
		Peningkatan kulaitas mutu produksi UKM	20	
		Fasilitasi dan pendampingan kelembangaan keungan bank dan non bank	20	
		Manajemen pembukuan keungan sederhana UKM	20	
		Bimbingan teknis mengenai pemsaran online	20	
		Jumlah	540	

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 Dinas Perdangan Koperasi dan UMK Kabupaten melakukan beberapa kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat UMK yaitu diantaranya: cara mendidik usaha dan studi kelayakan usaha yang diikuti sebanyak 25 peserta, pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagai basis UMKM yang diikuti sebanyak 25 peserta, akses pembiayaan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil adan menengah diikuti sebanyak 25 peserta, bimbingan tekonologi tepat guna budidaya jeruk organic diikuti sebanyak 25 peserta, kegiatan penerapan teknologi tepat guna teknik budidaya dilahan yang sempit dengan media drum diikuti sebanyak 25 peserta. Sedangkan, pada tahun 2016 Dinas Koperasi tidak ada melakukan kegiatan pelatihan kepada

masyarakat UMK. Selanjutnya, pada tahun 2017 Dinas perdagangan koperasi dan UMK melakukan beberapa kegiatan yaitu : sosialisasi kegiatan PKBL dan CSR dari PT. Telkom yang diikuti sebanyak 40 peserta, sosialisasi satandar akuntansi keuangan bagi koperasi yang diikuti sebanyak 10 peserta, pelatihan daesain kemasan produk UMK yang diikuti sebanyak 10 peserta, peningkatan SDM bagi pelaku UMK yang diikuti sebanyak 10 peserta, pemasaran berbasis online yang diikuti sebanyak 10 peserta, manajemen keuangan untuk UMK yang diikuti sebanyak 10 peserta, sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP dan EMKM yang diikuti sebanyak 50 peserta, dan sosialisasi strategi marketing dan program jaminan social ketenagakerjaan bagi para pelaku UMK Kab. Kampar yang diikuti sebanyak 40 peserta. Dan pada tahun 2018 Dinas perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengadakan peltihan sebanyak 8(delapan) kegiatan dengan rata-rata pelaku usaha yang mengikuti kgtan tersebut sebanyak 20 orang. Secara keseluruhan jumlah UMK yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dari tahun 2015-2018 sebanyak 540 peserta UMK.

Selain pemberian pelatihan yang diberikan seperti yang tertera diatas pemerintah melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK memberikan bantuan berupa permodalan, bantuan dana dengan system modal bergulir untuk modal usaha perseorangan, dengan modal ini diharapkan pelaku usaha yang telah meminjam dapat bertanggung jawab untuk mengembalikannya, karena akan di gulirkan kembali kepada pelaku lain yang belum mendapatkan bantuan. Dana ini dialokasikan untuk membantu pelaku usaha UMK.

Berikut adalah data mengenai UMK yang mendapatkan bantuan dana pada tahun 2017:

Table I.3: Daftar nama- nama UMK yang mendapatkan bantuan modal pada tahun 2017

NO	Jenis UMK	Nama UMK	Alamat
1.	Lopek bugi	Lopek bugi Zahra	Danau Bingkuang
		Lopek bugi Bu yenni	Danau Bingkuang
		Lopek bugi Lana Lani	Danau Bingkuang
2.	Keripik nenas	Madani	Kualu Nenas
		Kripik Nenas Restu	Kualu Nenas
		Berkah	Kualu Nenas
		Prima Tani	Kualu Nenas
3.	Pembibitan	Tani mandiri	Dusun I sungai pinang
		Tani Jaya	
4.	Pengelolaan Ikan	Salai ikan patin Zhidane	XIII Koto Kampar
		Wali Salai	Koto Mesjid
		Usaha Mndiri	XIII Koto Kampar
5.	Kuliner	Usaha Tahu	Bangkinang
6.	Kerajinan	Usaha Kue tradisional "Kak Ira"	
		Dedi saputra	JL. Sukajadi perm. mawddah
		Pandai besi Mansyur R.	Rumbio Jaya
		Pandai besi Agustiar	Rumbio jaya
		Pandai Besi	Rumbo jaya

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

Pemerintah melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar telah memberikan bantuan bagi pelaku usaha UMK bantuan dana berupa kredit lunak dengan bunga rendah sebesar 6 %, bantuan dana yang diberikan yaitu sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bantuan tersebut diberikan kepada 10-20 UMK per tahun.

Pada tahun 2017 terdapat 18 UMK yang mendapatkan bantuan permodalan yaitu dari jenis UMK lopek bugi terdapat 3 UMK, dari jenis UMK Keripik nenas terdapat 4 UMK, dari jenis UMK Pembibitan terdapat 2 UMK, dari jenis UMK pengelolaan ikan terdapat 3 UMK, dari jenis kuliner terdapat 2 UMK dan dari jenis UMK kerajinan terdapat 4 UMK sehingga total UMK yang mendapatkan bantuan permodalan pada tahun 2017 sebanyak 18 UMK

Bantuan dana dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dimaksudkan demi kemajuan UMK, tetapi pada kenyataannya masih kurang optimalnya peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMK yang ada pada Kabupaten Kampar, yang mana masih terdapat beberapa fenomena atau gejala- gejala permasalahan sebagai berikut:

1. Belum siapnya UMK menggunakan metode pemasaran online sehingga masih banyaknya UMK menggunakan cara pemasaran/promosi secara konvensional.
2. Hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan UMKM Kabupaten Kampar belum memiliki program pemberdayaan terhadap pemenuhan bahan baku usaha
3. Adanya indikasi kurangnya informasi pelaku UMK terhadap adanya bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan fenomena diatas yakni kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengelolah jenis industry Rumah Tangga ini di buktikan dengan masih adanya keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dengan kualitas yang kurang baik. Dari sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian yaitu dengan judul: **“ANALISI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) OLEH DINAS PERDANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan fenomena dan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini perlu menetapkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: **“ Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat UMK oleh Dinas Perdagangan Koperasi UMK di Kabupaten Kampar.**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil (UMK) Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis, yaitu hasil penelitian ini merupakan salah satu masukan dalam meningkatkan pemberdayaan UMK Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
3. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya usulan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topic masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanta dari segi tujuan dan hasil penelitian.

1. konsep pemerintahan dan ilmu pemerintahan

salam (2004;6) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu).

Secara umum tugas pokok pemeritah menurut Rasyid (1997;13) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. menjamin keamana Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berjalan langsung secara damai.

- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa menbeda-bedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum, dengan memberikan pelayanan umum dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut syafi'I (2011;8) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat setara dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dijadikan yang memiliki objek, baik objek material maupun formil, universal sifatnya, serta spesifik (khas). Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) adalah berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara baik dan benar.

Menurut H.A Barsz (dalam syafi'I, 2011;9) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut Ndaraha (2005;57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif, fungsi pemerintahan ada tiga yaitu: fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan.

Sarudjang(2002;25) mengemukakan pemerintah sebagai suatu Sub komponen geografis suatu wilayah tertentu. Pemerintahan memiliki semua atau sebagian besar ciri-ciri wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, oritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, menurut peraturan – peraturan daerah serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain berkewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya.

Diantara tugas terpenting Negara (state) pada masa kedepan yang diciptakan oleh kepentingan politik (politik environment) adalah mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development) dengan mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, lingkungan, ketentraman dan masyarakat, mencuatkan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokrasi pemerintahan, memperkuat finansial dan kepastian administrative pemerintahan local.

2. Konsep Peranan

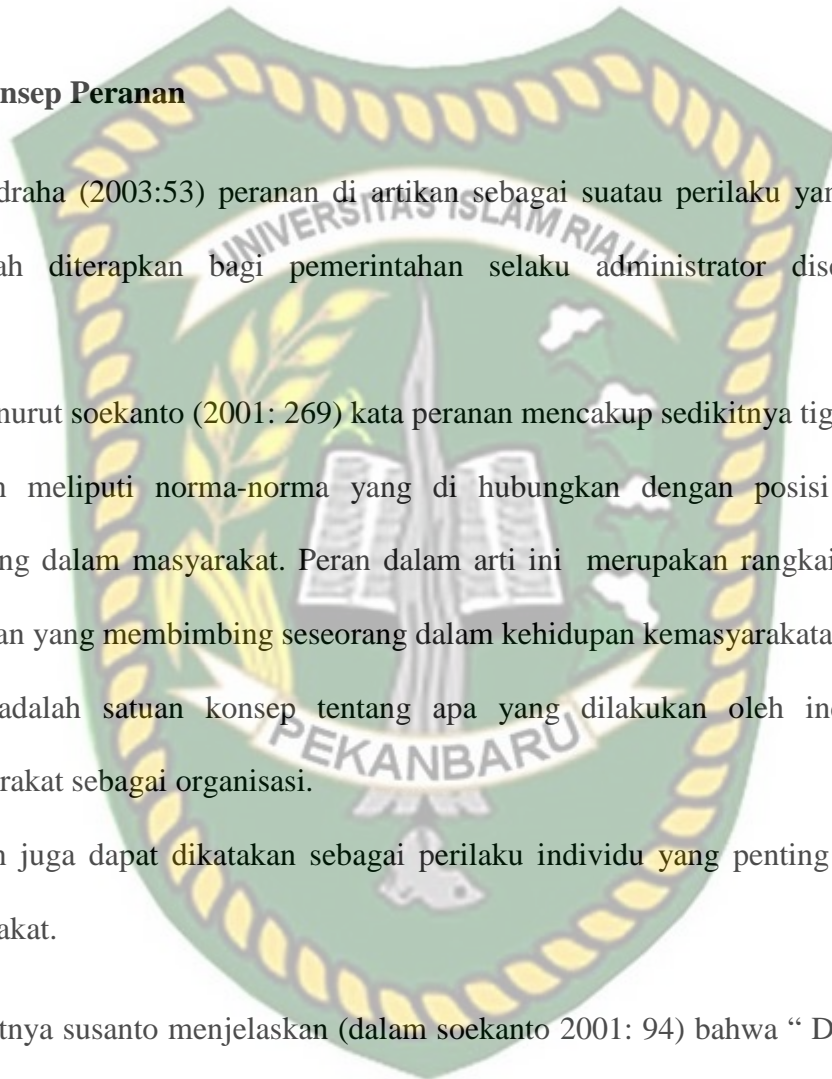
Menurut ndraha (2003:53) peranan di artikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah diterapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah satuan konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Selanjutnya susanto menjelaskan (dalam soekanto 2001: 94) bahwa “ Dengan adanya prestise dan derajat social maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status peranan. Peranana adalah dinamisasi dari ststus atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif.

Menurut poerwadarminta (2002: 73), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.



Menurut Soejono Soekanto (2002: 23) bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.

Suhardono (2004: 10), mengatakan bahwa : sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjukkan pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shodness*) untuk dibawakan. Patokan yang di anut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

3. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan titik sentral dari tujuan di aplikasikan setiap aspek studi Administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkufli, 2005;25) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sedangkan Zulkifli (2005:26) sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendeligan wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas.

Hamin (2005: 117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relative berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

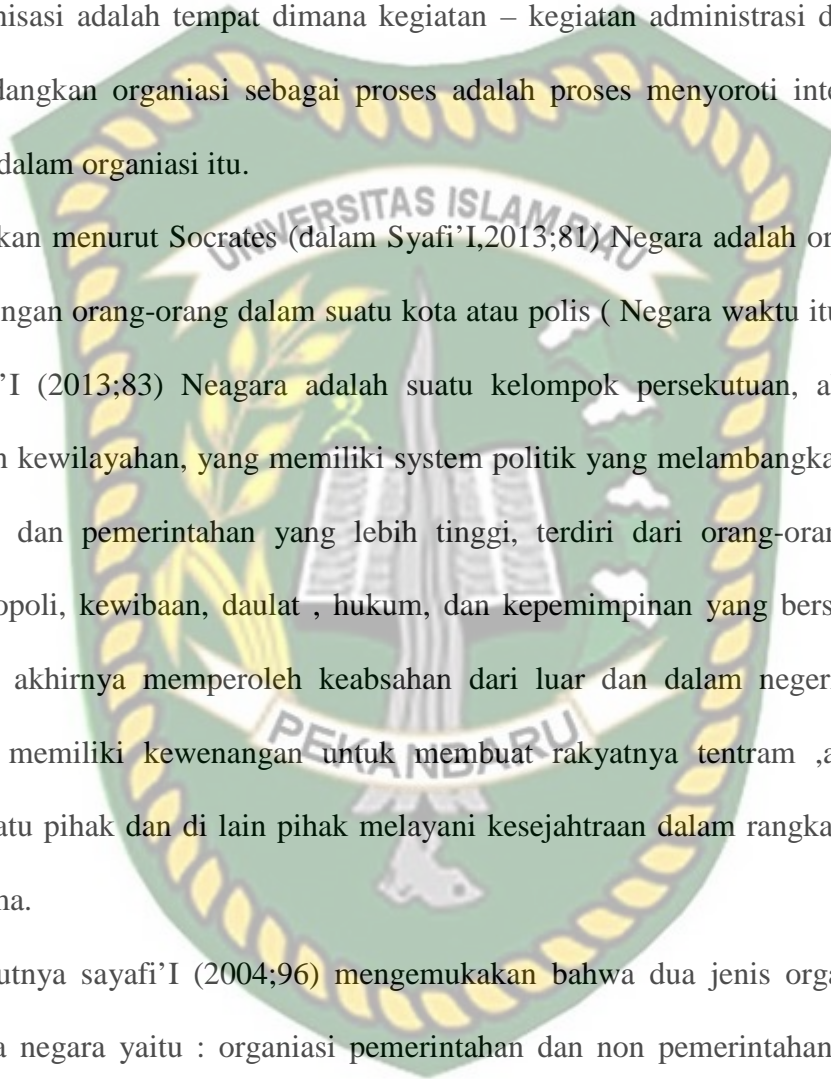
Robins (1994;4) bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi,

yang bekerja atas dasar yang relative terus- menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sebagian alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Sedangkan menurut Socrates (dalam Syafi’I,2013;81) Negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis (Negara waktu itu). Sedangkan menurut Syafi’I (2013;83) Negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki system politik yang melambangkan dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintahan yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang yang kuat memiliki monopoli, kewibaaan, daulat , hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri, selanjutnya organisasi ini memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tentram ,aman, teratur, terkendali di satu pihak dan di lain pihak melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.

Selanjutnya sayafi’I (2004;96) mengemukakan bahwa dua jenis organisasi secara global disemua negara yaitu : organisasi pemerintahan dan non pemerintahan (baik swasta yang bernuansa dengan maupun non dagang). Khusus untuk organisasi pemerintahan merupakan syarat utama suatu Negara disamping wilayah, penduduk dan pemgakuan. Organisasi pemerintahan dapat berubah tetapi Negara tidak berubah karena perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.



Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan sutau wadah atau suatu system saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang berkerjasama untuk mencapai tujian bersama.

4. Konsep Manajemen

Menurut siagian (2003;5) menjelaskan bahwa manjemn sebgai suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang laian.

Dalam defenisi ini, manajemen dititik beratkan pada usaha memfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Un is a district process untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang,tanggung jawab, dan tugas pekrjaan ((*job description*) yang jelas.

Selanjutnya Terry (dalam Hasibuan, 2009;2) manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

George R. Terry (2006;32) dalam bukunya *principles of management* mengatakna bahwa, “*management is a distrinct proces cinsisting og planning, organizing, actuating, controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives*” (manajemen adalah suatu penelitian proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan pemanfaatan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunkan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan manjemen hingga saat ini belum

ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah : ketatalaksanaan, manajemen, management dan perusahaan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda - beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen mengandung tiga pengertian :

- a) Manajemen sebagai proses
- b) Manajemen sebagai kolektivitas orang – orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c) Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), tindakan-tindakan, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

George R. Terry dalam Zulkifli (2009;16) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan- tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing- masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah diterapkan semula.

Selanjutnya Terry (2012;1) manajemen adalah suatu proses atau angka kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “ managing” pengelolaan, sedangkan pelaksanakannya disebut manager atau pengelola.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. suatu pekerjaan sebuah organisasi dapat diukur dengan banyak cara berbeda salah satu cara yang umum adalah dengan mengukur efisiensi dan efektivitas. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber

lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan didalam pengertian ini terdapat dua system yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu system organisasi dan sistem admisnistrasi. (Athoilillah, 2010;14).

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsure diataranya adalah :

1. Unsur tujuan oraganisasi, yang bila dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikutsertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi oraganisasi melalui kerja didalam tim (team work).
3. Unsur orang lain, jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan para pekerja dan para manajer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai printer.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat admisnistrasi.

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsure manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisa sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis juga sebagai kreativitas pribadi yang disertai suatu keterampilan.

Menurut Marhot (dalam Danang, 2013;1) manajemen sumber daya manusia adalah aktifitas yang dilakukan maerangsang, mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam oraganisasi. Berdasarkan defenisi diatas pula Marihot;2002 mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukunngannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan acara yang secara etis dan social dapat dipertanggung jawabkan .

Selanjutnya Abdurahmat (2006;3) mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari konsep totalitas kehidupan diatas perlu dilengkapi dengan dimensi kualitas yang bersifat strategis dalam konteks pembangunan seutuhnya, yaitu : keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, profesionala, intelektual, disiplin, dan efisiensi.

Sedangkan defenisi yang dikemukakan Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam oraganisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam

mencapaian tujuan, sehingga apapun yang dibutuhkan dalam suatu organisasi manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mewujudkan semua yang akan dicapai sesuai dengan keinginan.

6. Konsep Pengembangan Sumber Daya

Menurut Chris Rowley dan Keith Jackson (2012:88) pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Tantangan untuk membangun dan melestarikan keunggulan kompetitif bukanlah tantangan jangka pendek, tetapi merupakan tantangan jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi manajer untuk menganggap bahwa program pengembangan dan pelatihan merupakan program yang sama jangka panjang dan berkesinambungan dengan tantangan tersebut, karena itu pula, maka falsafah dan paradigma pengembangan dan pelatihan perlu dengan segera beradaptasi dengan tantangan tersebut, yakni tantangan jangka panjang dan strategis (Komaruddin Sastradipoera, 2006:137).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia Veithzal (2004:240) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan dan pengembangan :

- a) *Cost-effectiveness* (efektivitas biaya).
- b) Materi program yang dibutuhkan.
- c) Prinsip-prinsip pembelajaran
- d) Ketetapan dan kesesuaian fasilitas.
- e) Kemampuan dan preferensi peserta pelatihan.

f) Kemampuan instruksi pelatihan.

Menurut Hasan, (dalam Jusmalaini 2011;100) untuk memajukan kualitas sumber daya insane ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Dimensi keperibadian. Dimensi keperibadian menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas.
2. Dimensi Produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
3. Dimensi Kreativitas, dimensi ini menyangkut pada kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan suatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

Sedangkan tujuan sumberdaya manusia menurut Veithzal Rivai (2004;229) tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah:

- a. Untuk meningkatkan kuantitas output;
- b. Untuk meningkatkan kualitas output;
- c. Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan;
- d. Untuk jumlah dan biaya terjadi kecelakaan;
- e. Untuk menurunkan *turnover* , ketidakhadiran kerja serta meningkatkan kepuasan kerja;
- f. Untuk mencegah timbulnya antipasti karyawan.

Sedangkan menurut Komaruddin (2006;134) tujuan utama pengembangan sumber daya manusia itu adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi sumber daya manusia yang bekerja dan akan bekerja pada lingkungan industry sehingga mereka bekerja, mengembangkan diri mereka masing-masing dan mengembangkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain termanifestasi dalam

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dedikasi, loyalitas, disiplin, sikap, perilaku, kesadaran, aktivitas, kreativitas, produktivitas, profesi, hubungan insan, akuntabilitas, semangat korps, dan karier. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan pengembangan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud disini adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perubahan sikap dan perilaku.

7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah empowerment. Kata power dalam empowerment diartikan sebagai “daya” ditambahkan awalan pe- dan akhiran -an menjadi pemberdayaan. Daya dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur pengetahuan yang di serapkan dari luar. Dalam ilmu sosial, terdapat berbagai definisi dan pemahaman mengenai pemberdayaan.

Pemberdayaan dalam sebuah literatur dipandang sebagai sebuah proses dan sekaligus sebuah tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat.

Manuwoto (1998;15) memberikan definisi pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikamt, 2001) mengemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan sebagai konsep social budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan kembang nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambahan social budaya.

Pandangan mengenai pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh pranaka (1996;45-70) yaitu:

- a) Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*, pandangan ini diadasi oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah memterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk menegembangkan eksistensi manusia dan menyelamatkan asumsi dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.
- b) Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to every body*) . pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang berpusat akan menimbulkan kecenderungan mengalisis hak normative manusia yang tidak berkuasa atau tidak dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusi kesemua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.
- c) Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan yang lainnya. Pandangan ini adalah anti tesis dari dua pandangan : *to nobody* dan pandangan *power to every body*, pandangan *power to nobody* adalah kemustahilan dari *everybody* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu pasangan ketiga yang paling raelistis adalah *power to the powerless*.

Kemudian pemberdayaan dapat dibedakan dalam dua hal: pertama, bahwa pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuasaan dan kemampuan pada individu atau sekelompok agar lebih berdaya, ada unsure luar (baik dalam bentuk lembaga kemandirian ataupun individu) yang memberikan kekuatan (*power to powerless*) untuk dapat mengambil

peran yang berharga bagi lingkungannya. Kedua, memunculkan kekuatan yang kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam, melalui stimulasi dan motivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang dimiliki.

Pranaka (1996;57) menyebut hal tersebut kecenderungan primer dan sekunder. Kedua kecenderungan akan merubah individu atau kelompok dari kondisi serba keterbatasan dan ketidak berdayaan menjadi mampu untuk mendobrak segala keterbatasan hingga lebih dapat mengembangkan. Proses dirinya pemberdayaan muncul dari kondisi social ekonomi budaya yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasi untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasi, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasi (empowerment of the powerless). Pemberdayaan hendaknya menyangkut kondisi social, ekonomi dan budaya dari yang diberdayakan.

Selanjutnya Pranaka (1996;139-145) menyatakan dalam implementasi proses pemberdayaan, terdapat antara lain dua aspek penting yaitu partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok sasaran, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedangkan aspek ter-desentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah yang terdekat dengan penduduk miskin. Penduduk miskin dianggap yang paling mengetahui usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mana yang paling mendesak.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan umumnya mempunyai arahan yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain. Langkah itu pada dasarnya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus menerus. Upaya pemberdayaan tidak lepas dari langkah partisipasi, tanpa partisipasi upaya yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bisa dicapai secara optimal biasa masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan dalam setiap tahap pembnagunan bararti masyarkat merupakan subjek dari proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi program.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pemberdayaan adalah upaya memmbuat sesuatu berkemampuan/berkelanjutan. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelakasaan program pemberdayaan masyarakat:

- a) Berkurangnya jumlah masyarakat miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapat yang dilakukan penduduk miskin dengan sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- d) Meningkatkan kapasitas kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota kelompok.
- e) Meningaktakan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya pempapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka dalam Hikamat (2001;11) mengemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagi konsep sosial budaya yang implemtatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan kembangkan nilai tambah ekomnomi tetapi juga nilai tambah sisoal budaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan local itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Kartasasmita (1997) memiliki pandangan tersendiri tentang pemberdayaan, ia mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah usaha meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat bawah yang kondisinya tidak kuat/mampu untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakanga. Dengan kata lain, pemberdayaan artinya memampukan serta memandirikan masyarakat.

Adapun indicator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Ginanjar Kartasasmita (1997) upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1) Pemungkinan (enabling)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang saecara optimal, harus membebaskan masyarakat adari sekat-sekat kultur dan structural yang menghambat.

2) Penguatan(empowering)

Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan dan memenuhi kebutuhan- kebutuhan secara mandiri.

3) Perlindungan (protecting)

Harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan domains.

8. konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas kerja dan memberikan pelayan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan para Usaha Besar Milik Negara.

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Nomor 20 tahun 2008 Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif untuk perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Neagara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pekadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal, hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Prinsip pemberdayaan UMKM:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b. Mewujudkan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c. Pembangunan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
 - d. Peningkatan daya saing UMKM.

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan UMKM:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dan kemiskinan.



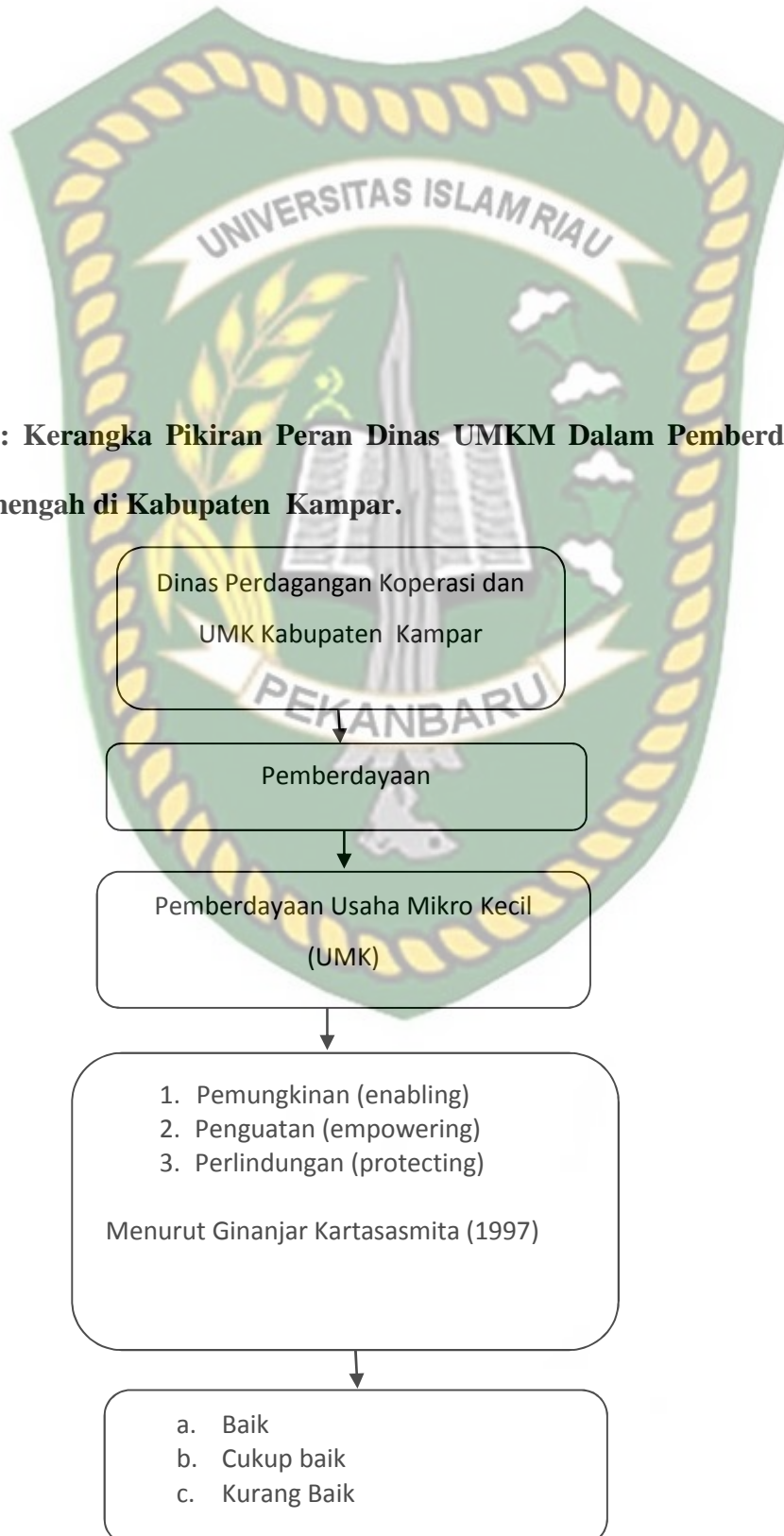
B. PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA	JUDUL	TEORI	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1.	ROMAULI	ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KECAMATAN RENGAT OLEH DINAS KOPERSI DAN UMKM KABUPATEN INDRAGIRI HULU	Pemberdayaan masyarakat adalah satu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pas atau tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu	1. Pemungkinan (enabling) 2. Penguatan (empowering) 3. Perlindungan (protecting)

			klompok masyarakat. (Manuwoto, 1998:15)	
2.	YUSUF ANUARI	PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) DI KABUPATEN ROKAN HILIR.	Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. (Sumaryadi 2005: 114)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dana 2. Penyediaan sarana 3. Pelatihan 4. Penguatan kelembagaan
3.	NINDY INDAH PUTRI	PEMBERDAYAAN PENGRAJIN RITAN DI RUMBA PESISIR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU	Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat. (Manuwoto, 1998:15)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungkinan (enabling) 2. Penguatan (empowering) <p>Perlindungan (protecting)</p>

C. KERANGKA PIKIR

Dari penjelasan latar belakang masalah dan juga studi kepustakaan, penulis selanjutnya merumuskan kerangka pikir penelitian yang berkaitan dengan Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar.” Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Peran Dinas UMKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kampar.

Sumber: Modifikasi Penelitian, Tahun 2018

D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Sugiono (2005;70). **“Diduga Kurangnya Tingkat Pemberdayaan UMK Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar.**

E. Konsep Operasioanal

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional seperti berikut:

1. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
2. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK merupakan badan yang memiliki wewenang merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan pembeedayaan pada masyarakat UMK.
3. Pemerdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pembangunan usaha terhadap UMK, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.



1. Pemungkinan (Enabling)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur dan kultur yang menghambat.

2. Penguatan (empowering)

Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri.

3. Perlindungan (Protecting)

Harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan bentuk diskriminasi dan dominasi.

F. OPERASIONAL VARIABEL

Selanjutnya variabel yang di analisis dalam penelitian ini dalam sebuah tabel dibawah ini dan operasionalkan sebagai berikut:

Table II.I: Operasional variable penelitian tentang Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5

Pemberdayaan masyarakat dalam usaha meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat bawah yang kondisinya tidak kuat/mampu untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemerdayaan adalah memampukan serta memandirikan masyarakat (Ginjar Kartasmita:1997)	Peran Dinas Perdagangan dan UMK dalam pemberdayaan UMK di Kabupaten Kmapar	1. Pemungkinan (enabling)	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkemabang secara optimal. Membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur yang dapat menghambat perkembangan masyarakat. Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Penguatan (empowering)	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah Mengarahkan agar dapat memnuhi kebutuhannya secara mandiri. 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik 	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Perlindungan (protecting)	<ul style="list-style-type: none"> Memeberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agara tidak tertindas 	Baik Cukup Baik

			<p>oleh kelompok kuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah. • Memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil. • Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis. 	Kurang Baik
--	--	--	---	-------------

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018

G. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian tentang Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Kampar. teknik pengukuran atau skala yang digunakan untuk setiap indicator dan variable dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) katagori, yaitu :

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaba responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaba responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK dan UMKM

dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 1-33%.

Selanjutnya untuk menentukan pengukuran pada masing –masing indicator variable pengembang UMK oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1. Pemungkinann(enabling)

Pemungkinan (enabling) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur yang menghambat.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 1-33%.

2. Penguatan (empowering)



Penguatan (empowering) yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten berada pada skor 67-100%.

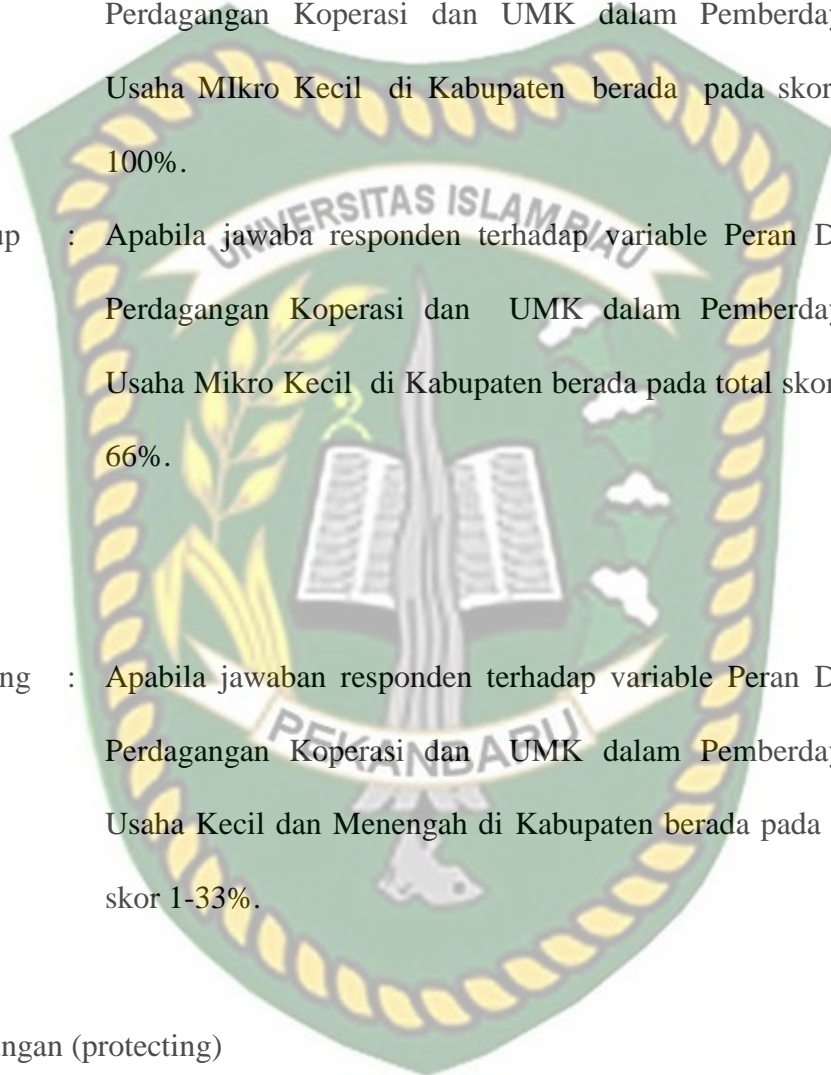
Cukup : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Baik Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten berada pada total skor 34-66%.

Kurang : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Baik Perdagangan Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 1-33%.

3. Perlindungan (protecting)

Perlindungan (protecting) yaitu harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

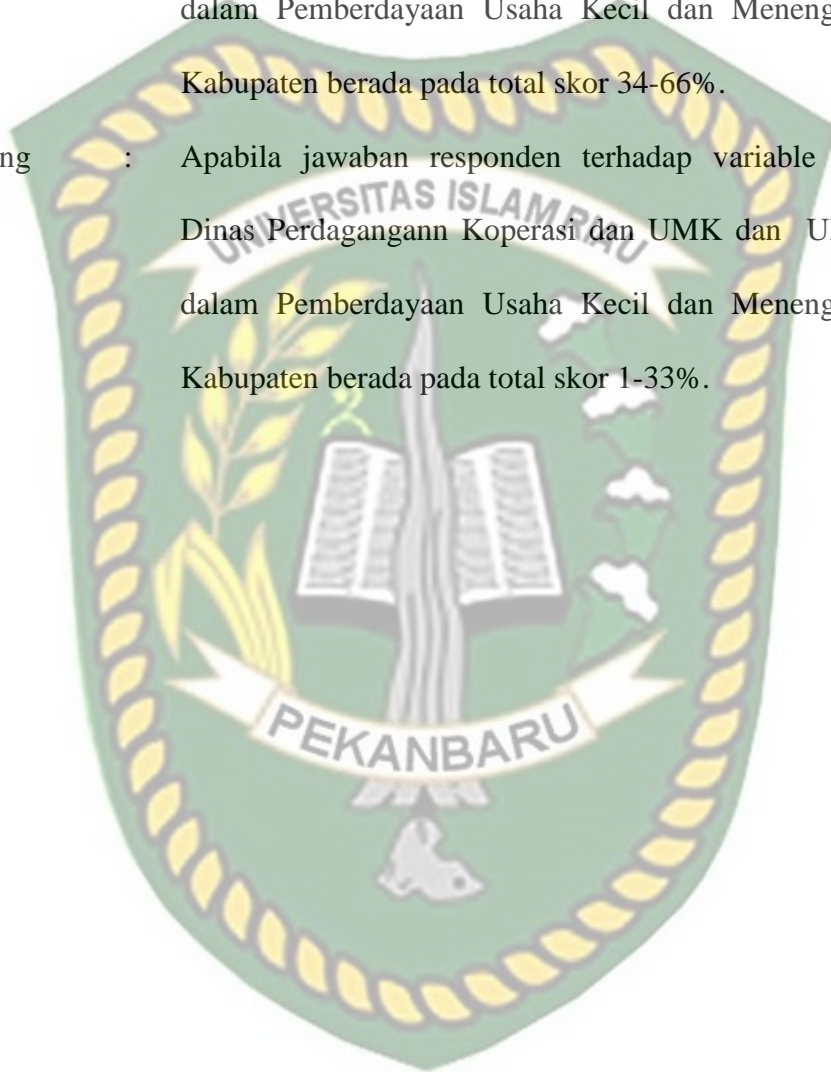
Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam



Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap variable Peran Dinas Perdagangann Koperasi dan UMK dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten berada pada total skor 1-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian dalam menghimpun informasi awal tentang pendapat responden terhadap peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di kabupaten Kampar .

Oleh karena itu dapat dikatagoerikan sebagai survey Deskriptif, dimana penggunaan sampel/responden sebagai sumber data yang utama dan juga merupakan alat kumpul data yang penting dan metode kuisisioner/wawancara. Data yang diperoleh dari gejala-gejala yang terdapat dalam survey atau pada saat penelitian dalam survey deskriptif tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk Menganalisi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Mnengah Kabupaten Kampar.

Adapun metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut Silalahi (2010;76) Metode Kuantitatif dapat dikonstruksikan sebagai strategi penelitian yang menekankan kuantifikasi dalam pengumpulan data dan analisis data dengan menempatkan pengujian teori (testing of theory). Oleh Karena itu, penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah social berdasarkan pengujian sebuah teori dan variable-variabel, diukur dengan angka dan analisis dengan prosedur statistic untuk menemukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Kampar, pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini dikarekan Kabupaten Kampar memiliki kemajuan UMK yang cukup bagus selain itu, penulis juga menemukan adanya beberapa fenomena dan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan usaha mikro kecil yang ada pada Kabupaten Kampar antara lain

yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya teknologi, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut agar penulis dapat menganalisis fenomena dan permasalahan yang penulis temukan dilapangan.

Sebagai salah satu Kabupaten nomor 3 terluas di provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.707,64 km² atau sama dengan 12,6 % dari luas provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki penduduk ± 534.050 jiwa. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Bangkinang Kota, Bangkinang barat, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kampar kiri, Kamapar Timur, Kampar Utara, Kampar, Kota Kamapar Hulu, Perhentian Raja, Rumbio jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Tapung, dan XIII Koto Kampar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya Siswojo menyatakan bahwa populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat criteria yang ditentukan peneliti (dalam Mardais,2014;53). Menurut Komaruddin populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel (dalam Mardalis.2014;53).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (sugiyono. 2010;81). Artinya, apabila pupolasi penelitian tersebut besar maka pada saat penelitian tidak mungkin mengambil semua populasi untuk dijadikan objek penelitian atau mengamati semua yang ada pada populasinya, misalkan terkendala waktu, dana, dan

sebagainya sehingga diambil sampel dari populasi tersebut, namun sampel yang diambil harus benar-benar mewakili.

Menurut Mardalis (2014;55-56) sampel yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian, dengan tujuan memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan mengamati hanya sebagian dari populasi, mengemukakan dengan sifat-sifat umum dari populasi, untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan, serta untuk mengadakan penaksiran peramalan dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Kepala Bagian pemberdayaan UMK, Seksi Pengawasan serta masyarakat yang mengelola Usaha Mikro.

Table III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan Masyarakat UMK Kabupaten Kampar.

No	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	1	1	100%
2.	Kepala bidang pemberdayaan UMK	1	1	100%
3.	Seksi pemberdayaan pengembangan, promosi, dan peluang usaha	1	1	100%
4.	Pelaku Usaha Kripik Nenas	16	4	25%
5.	Pelaku usaha Lopek Bugi	24	6	25%
6.	Pelaku usaha Pengelolaan Ikan	12	3	25%
7.	Pelaku usaha Kuliner	26	6	25%
8.	Pelaku usaha Kerajinan	18	4	22%
Jumlah		130	23	52,8 %

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK UMKM Kabupaten Kampar.

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparaturnya adalah teknik sensus. Sementara untuk kelompok masyarakat dengan teknik yang digunakan yaitu metode purposive sampling.

- Teknik sensus menurut martono yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel.
- Purposive sampling (sampel bertujuan) menurut martono merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dalam topik penelitian

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari objek atau responden yang akan diteliti, seperti Kepala Dinas, Kepala bidang UMKM, Seksi pengawasan dan pengadilan, serta masyarakat yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Dengan memperoleh data berupa tanggapan responden terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi ataupun keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian mengenai program pemberdayaan masyarakat. Data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau dengan menggunakan dokumen. Data ini juga dapat berupa arsip, literature, laporan, ataupun petunjuk pelaksanaan mengenai program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kampar.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap focus penelitian. Yang akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Teknik Observasi

Yaitu teknik memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap para masyarakat yang mengikuti pembinaan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) tersebut. Untuk mengumpulkan data dan melihat fenomena yang terjadi pada program pembinaan yang dilaksanakan, sehingga data yang dikumpulkan akan semakin lengkap.

2. Teknik Wawancara atau *Interview*

Yaitu suatu teknik untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan secara tertulis yang akan ditujukan kepada responden mengenai program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Dengan tujuan mendapat informasi dan data yang tepat dari para responden. Untuk melengkapi data dan informasi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

3. Teknik Kuisioner

Yaitu teknik atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran atau memberikan beberapa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab, agar diketahui seberapa besar tanggapan para responden terhadap program

tersebut. Hasil dari teknik kuisisioner ini dapat diketahui dengan menilai tingakat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut.

4. Teknik Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data-data mengenai, pelaksanaan kegiatan pembinaan, sejarah singkat lokasi penelitian, serta dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, juga dilengkapi dengan foto.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk table, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu acara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang permasalahan tentang permasalahan berdasarkan kenyataan dilapangan secara tepat.



H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMK) di Kabupaten Kampar.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Perbaikan UP							■	■								
4	Riset									■	■	■	■				
5	Penelitian Lapangan													■	■	■	■
6	Penelitian dan Analisis Data																
7	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																
8	Ujian Skripsi															■	■
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi															■	■
10	Penyerahan Skripsi																■

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 september 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah tingkat II D provinsi Riau terdiri dari Kawedanan Pelalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekan baru Luara kota dengan ibu kota Pekan baru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksanan tanggal 16 juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun factor-faktor yang mendukung pemindahan itu kota Kabupaten Kampar ke bangkinang antara lain:

- 1) Pecahan baru sudah menjadi ibukota provinsi Riau
- 2) Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi kota madya
- 3) Mengingat luasnya Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota di pindahkan ke bangkinang guna meningkatkan efesiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi di bina dengan baik dari pekanbaru.
- 5) Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah kabuapten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

1. Kedaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" lintang utara sampai 00027'00" lintang selatan dan 100028'30" Bujur timur. Batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan daerah kota pekanbaru dan Kabupaten siak
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten kuantan singingi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten rokan hulu dan provinsi sumatera barat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten pelalawan dan Kabupaten siak

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km kedalam rata-rata 7,7 m dengan lebar 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan XIII Koto Kampar, bangkinang, Bangkinang barat, siak hulu dan Kampar Kiri.
- Sungai siak bagian hulu yakni panjang \pm 90 km dengan kedalam rata-rata 812 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana penghubung, sumber air bersih, budidaya ikan maupun sebagai sumber energy listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperature maksimal 32⁰ C. jumlah hari hujan dalam tahun 2006, yang terbanyak adalah disekitar, Salo, Bangkianan Seberang sedangkan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU No 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Riau Nomor :KPTS.318VIII987 tanggal 17 juli tahun 1987. Pembantu bupati wilayah I

berkedudukan di Pasir Pangaraian dan pembantu bupati wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah kecamatan langgam, pangkalan kuras, bunut, dan kualu Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator kabupaten.

Seiring perjalanan waktu dengan berbagai perubahan peraturan, sekarang Kabupaten Kampar terus mengalami pemekaran dengan jumlah kecamatan yang terus berkembang.

Daftar 21 kecamatan di Kabupaten Kampar (Wikipedia) :

1. Kecamatan Bangkinang dengan ibu kota: Bangkinang
2. Kecamatan Bangkinang Barat dengan ibu kota: Kuok
3. Kecamatan Bangkinang Seberang dengan ibu kota: Muara Uwai
4. Kecamatan Kampar dengan ibu kota: Air Tiris
5. Kecamatan Kampar Timur dengan ibu kota: Kampar
6. Kecamatan Kampar Utara dengan ibu kota: Desa Sawah
7. Kecamatan Salo dengan ibu kota: Salo
8. Kecamatan Rumbio Jaya dengan ibu kota: Teratak
9. Kecamatan Kampar Kiri dengan ibu kota: Lipat Kain
10. Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan ibu kota: Sei.Pagar
11. Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan ibu kota: Gema
12. Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan ibu kota: Simalinyang
13. Kecamatan Siak Hulu dengan ibu kota: Pangkalanbaru
14. Kecamatan Gunung Sahilan dengan ibu kota: Kebun Durian
15. Kecamatan Perhentian Raja dengan ibu kota: Pantai Raja
16. Kecamatan Tambang dengan ibu kota: Sei.Pinang
17. Kecamatan Tapung dengan ibu kota: Petapahan
18. Kecamatan Tapung Hilir dengan ibu kota: Pantai Cermin



19. Kecamatan Tapung Hulu dengan ibu kota: Sinama Nenek
20. Kecamatan XIII Koto Kampar dengan ibu kota: Batu Besurat
21. Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ibukota: Tanjung.

2. Penduduk

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yang memiliki luas wilayah cukup besar dibanding Kabupaten lainnya yang ada di Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km². Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan yang dipadati penduduk secara total sebesar 783.248 Jiwa (Permendagri No.66 Tahun 2011).

B. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK pada awalnya di dirikan ada tahun 1970-an dengan nama Departement Koperasi. Departement Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jawatan yaitu Perdagngan, Koperasi, dan Transmigrasi. Pada periode ke dua yaitu pada tahun 1985 departement koperasi mulai bridiri sendiri yang hanya megurus dua jawatan yaitu Perdagangan dan Koperasi.

Setelah otonomi daerah pada tahun 1988, Departement Koperasi berganti nama menjadi Dinas Kopersi. Setelah otonomi itulah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar berdiri. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan Usaha Kecil Menengah Kabpaten Kampar terletak di jalan Jendral Sudirman No. 11 Bangkinang Kabupaten Kampar.

1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Salah satu syarat berdirinya suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan namun organisasi kemasyarakatan harus memiliki struktur organisasi. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan organisasi pemerintahan yang struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan dan Data
- c. Sub bagian keuangan dan Aset
- c. Bidang perdagangan dan pasar
 - a. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar
 - b. Seksi Pengembangan perdagangan pasar
 - c. Sekdi Distribusi Predaran Barang
 - d. Bidang pengawasan dan pengendalian
 - a. Seksi Pengawasan Barang Bersubsidi dan Perizinan
 - b. Seksi Pengawasan Pangan dan Pemantauan Harga barang
 - c. Seksi pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
 - e. Bidang kelembagaan dan penyuluhan koperasi
 - a. Seksi Badan Hukum dan Penyuluhan Koperasi
 - b. Sekdi Pembiayaan, Kemitraan dan Peningkatan SDM Koperasi
 - c. Seksi Pengawasan dan Penilaian KSP/USP

- f. Bidang pemberdayaan UMK
- a. Seksi pengembangan kelembangan dana sdm, pembiayaan kemitrassn umk
- b. Seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2. Fungsi dan Tugas Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Kepala Dinas memiliki Tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi dan UMK
- b. Menyusun pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- c. Menyusun program rencana pembangunan Perdagangan, Kopearsi dan Usaha Mikro Kecil
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- e. Melakukan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- f. Melakukan koorDinasi penyusunan program pengelohan data dan informasi dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil
- g. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan sumberdaya manusia perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, tata laksana kepegawaian keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Fungsi dan Tugas Bidang Pemberdayaan UMK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Bidang Pemberdayaan UMK Memiliki Tugas sebagai berikut:

1. Bidang pemberdayaan UMKM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan, pengembangan peluang usaha mikro kecil produksi serta pemasaran produk UMK.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan UMK melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan bidang - bidang pengembangan dan produksi pemasaran UMK.
 - b. Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keuangan UMK.
 - c. Memberikan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UMK.
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber permodalan dan pematapan struktur permodalan UMK, usaha dan peluang Usaha UMK.
 - e. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UMK dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazaskan kesetiaan.
 - f. Mengkoordinasi, menyelenggarakan promosi terhadap produk unggulan UMKM

- g. Meningkatkan akses pangsa pasar dan teknologi tepat guna bagi UMK.
- h. Menyusun pendataan UMK dan restrukturisasi usaha.
- i. Melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK,
- j. Meningkatkan akses fasilitas, pembiayaan dan permodalan UMK
- k. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi UMK untuk sentra-sentra UMK untuk membentuk lembaga usaha menjadi koperasi.
- l. Membantu penataan pembukuan sederhana terapan pada UMK dalam menjalankan usaha yang akuntable
- m. Menyiapkan data-data klaster UMK sesuai aset dan omset yang tercapai sesuai aturan yang berlaku.
- n. Melaksanakan dan memimpin rapat-rapat staf.
- o. Membuat laporan palakasana tugas dibidangnya kepada kepala Dinas.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN PEMBAHAS

A. Identitas Responden

Identitas Responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisa yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Pemberdayaan UMK, Kepala seksi pemberdayaan, pengembangan peluang usaha dan promosi. Dan menyebarkan kuisisioner sebanyak 20 kuisisioner kepada masyarakat pengelola usaha mikro kecil Kabupaten Kampar yang mengikuti pelatihan pada Dinas Kopearsi Usaha Mikro Kecil Kabuapten Kampar. Adapaun indentitas responden yang di paparkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari jenis kelamin, usia responden, jenjang pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan responden.

1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian responden sebagai data pelengkap penelitian ini, dapat dilihat jenis kelamin responden yang tidak mempengaruhi penelitian namun sebagai pelengkap identitas responden dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.I : Klasifikasi Responden menurut latar Belakang Janis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK / Informan	2	1	3
2.	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil	8	12	20
Jumlah		10	13	23
Persentase		43 %	57 %	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan tahun 2018

Dari table V.I diatas dapat disimpulkan bahwa 3 orang sebagai informan yaitu terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK), dan Kepala bidang Pemberdayaan UMK, serta Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan, Pengembangan, Peluang Usaha Dan Promosi, serta sebagian besar masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Kampar yakni laki – laki sebanyak 8 orang, sedangkan masyarakat pengelola usaha mikro kecil Kabupaten Kampar yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya perempuan lebih dominan dalam pengelolaan usaha mikro kecil Kabupaten Kampar dari pada dengan laki-laki.

Sehingga dapat diketahui juga bahwa jumlah keseluruhan responden penelitian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau dengan persentase 43 % (empat puluh tiga persen), dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang dengan persentase 57 % (lima puluh tujuh persen). Dengan tersebarnya responden pada jenis kelamin diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan fakta yang ada dilapangan.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden, semakin tinggi pendidikan responden semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh penelitian dalam kuisisioner penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar seta penyebaran kuisisioner, maka dapat diketahui bahwa tingkatan pendidikan para responden yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini data dilihat pada table dibawah ini :

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Pegawai & Informan	Masyarakat		
1.	SMP/Sederajat	-	5	5	22%
2.	SMA/ Sederajat	-	10	10	43%
3.	D3	-	2	2	9%
4.	S1	2	3	5	22%
5.	S 2	1	-	1	4%
Jumlah		3	20	23	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) orang atau sekitar 22 % responden pada kelompok masyarakat pengelola usaha mikro kecil yang berpendidikan SMP/Sederajat, 10 (sepuluh) orang masyarakat atau sekitar 43% responden pada kelompok masyarakat pengelola usaha mikro kecil yang berpendidikan SMA/Sederajat, 2 orang atau sekitar 9% dari masyarakat pengelola usaha mikro kecil yang berpendidikan D3, 3 orang dari responden pengelola usaha mikro kecil dan 2 orang dari responden pegawai Dinas atau sekitar 22%

yang berpendidikan S1, dan selanjutnya ada 1 orang yang berpendidikan S2 atau sekitar 4% informan dari jumlah keseluruhan.

3. Usia Responden

Berdasarkan hasil kuisioner penelitian tentang analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, yang telah disebarkan kepada masyarakat selanjutnya melalui wawancara dengan beberapa orang informan sehingga menghasilkan data usia responden yang dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini :

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

No	Umur	Kelompok Responden		Jumlah	Presentase
		Pegawai	Pelaku UMK		
1.	<40	-	8	8	35%
2.	41-50	1	7	8	35%
3.	51-60	2	3	5	22%
4.	>60	-	2	2	8%
Jumlah		3	20	23	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2018

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pegawai atau informan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK yang usianya berada pada rentang usia <40 tahun dan ada sekitar 8 orang dari pelaku usaha mikro kecil yang usianya berada pada rentang usia <40 tahun, sehingga jumlah keseluruhan responden yang memiliki usia pada rentang <40 tahun berjumlah 8 orang atau sekitar 35% dari jumlah keseluruhan.

Selanjutnya, pada rentang usia 41-50 tahun ada sekitar 1 orang informan dari Dinas Kopersi yang berada pada rentang usia 41-50 tahun dan ada sekiat 7 orang dari pelaku Usaha Mikro Kecil yang berada pada rentang usia 41-50 tahun, sehingga pada rentang usia 41-50 tahun berjumlah 8 orang atau sekitar 35% dari jumlah keseluruhan, pada renang usia 51-60 ada sekitar 2 orang di Dinas Kopersi yang berada pada rentang usia 51-60 tahun dan pada

pelaku usaha mikro kecil terdapat 3 orang yang berada pada rentang usia 51-60 tahun, sehingga pada rentang usia 51-60 tahun berjumlah 5 orang atau sekitar 22% dari jumlah keseluruhan, pada rentang usia >60 tidak ada pegawai atau informan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK yang usianya berada pada rentang usia >60 tahun sedangkan pada pelaku usaha mikro kecil terdapat 2 orang yang berada pada rentang usia >60 tahun sehingga berjumlah 2 orang atau sekitar 8% dari jumlah keseluruhan yang ada.

B. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat terutama dalam memberikan pembinaan dalam bidang manajemen kewirausahaan pemberdayaan yang dilakukan yaitu dalam bidang meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan mutu kemasan, manajemen pembukuan, manajemen pemasaran dan meningkatkan mutu label pada kemasan. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah daerah Kabupaten Kampar khususnya Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Pemberdayaan UMK, dan Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Promosi dan Peluang Usaha memiliki wewenang untuk melaksanakan, membina, dan mengawasi kegiatan pembinaan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah dilakukannya observasi penelitian di lokasi Kabupaten Kampar oleh peneliti ditemukan beragam permasalahan yang dijumpai di lokasi, hal ini perlu adanya pembinaan pemberdayaan usaha mikro kecil oleh kepala bidang Pemberdayaan UMK dan Kepala seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha untuk peningkatan kualitas pembinaan terhadap usaha mikro kecil dengan demikian di perlukan Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Setelah mendistribusikan kuisioner kepada responden penelitian yakni masyarakat pengelola usaha mikro kecil Kabupaten Kampar dan melakukan wawancara kepada wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, maka hasil responden baik hasil olahan kuisioner dan wawancara akan penulis jelaskan secara berurutan perindikator yakni sebagai berikut:

1. Pemungkinan (enabling)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebsakan masyaraat dari sekta-sekat culture dan structural yang menghambat. Yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sehingga dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan data berkembang dengan poetensi masyarakar di Kabupaten Kampar.

Hasil tanggapan responden yaitu masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada indicator pemungkinan (enabling) yang akan dianalisis data dilihat pada tabel berikut ini, ada 4 item pertanyaan yang isi 20 orang responden penelitian pada kapasitas pemungkinan (enabling) yang akan diperoleh hasil penlitian sebagai berikut :



Tabel V.4 : Tanggapan Responden Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (enabling) yang akan di analisis

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang	9 (45%)	6 (30%)	5 (25%)	20 (100%)
2.	Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)
3.	Membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural yang dapat menghambat perkembangan masyarakat	7 (35%)	8 (40%)	5 (25%)	20 (100%)
4.	Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan	11 (55%)	7 (35%)	2 (10%)	20 (100%)
Jumlah		37	28	15	100
Rata-rata		9	7	4	20
Persentase		45%	35%	20%	100%

Sumber: Olahan Peneliti tahun 2018

Pada tabel V.5 di atas dapat dilihat jawaban responden masyarakat tentang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, bahwa responden menjawab baik sebanyak 9 orang atau dengan persentase 45% (empat puluh lima persen), kemudian cukup baik sebanyak 6 orang atau dengan persentase 30% (tiga puluh persen), dan yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25% (dua puluh lima persen). Jadi rata-rata responden menjawab “baik” dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, hal ini menunjukkan bahwa proses pemungkinan (enabling) sudah diterapkan sudah terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden masyarakat tentang memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal, responden yang menjawab dengan baik sebanyak 10 orang atau dengan persentase 50% (lima puluh persen), kemudian cukup baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase 35% (tiga puluh lima persen), dan kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan persentase 15% (lima belas persen). Jadi rata-rata responden menjawab “baik” dalam memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses pemungkinan (enabling) sudah diterapkan dengan baik, berdasarkan indikator pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal.

Selanjutnya jawaban respon masyarakat tentang membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, responden yang menjawab baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase 35%, kemudian yang cukup baik sebanyak 8 orang atau dengan persentase 40%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25%. Jadi rata-rata responden menjawab “cukup baik” dalam membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa proses pemungkinan (enabling) sudah diterapkan dengan baik.

Dan jawaban masyarakat tentang mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan, responden yang menjawab baik sebanyak 11 orang atau dengan persentase 55%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase 35%, dan yang menjawab kurang baik 2 orang atau dengan persentase 10%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan “baik”.

Hasil wawancara dengan bapak sekeretaris Dinas Perdagangan koperasi dan UMK kabupaten Kampar mewakili jawaban dari kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar yaitu bapak Purwadi SP., M.Si (3 Desember 2018), menyatakan: “bahwa dalam memberikan pembinaan khususnya pemungkinan (enabling) untuk

menciptakan masyarakat dapat berkembang secara optimal sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan dalam program kerja masih ada yang belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan UMK bapak H. Ibrahim SPd., M.Si (3 Desember 2018), menyatakan : “ Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil sudah dilaksanakan berdasarkan petunjuk yang telah diterapkan masih ada hambatan yang dialami pihak Dinas dalam memberikan pembinaan dalam hal pemungkinan (enabling), hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya yang ada pada saat ini.

Kemudian hasil wawancara dengan seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha ibu Hj. Elli Yudia S,E (3 Desember 2018) menyatakan: “ dalam melakukan kegiatan program kerja kami sudah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengembangan usaha sehingga dalam kegiatan pemungkinan (enabling) menciptakan masyarakat berkembang yaitu dengan melaksanakan pengelompokan usaha.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilihat dari indikator Enabling (pemungkinan) yaitu memungkinkan potensi masyarakat berkembang yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) di dilakukannya sosialisasi dengan baik, pihak Dinas telah melakukan Pelatihan, Pengawasan, serta pengelompokan pada pelaku usaha memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan dan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa key informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan yang dinilai dari pemungkinan (enabling) dapat disimpulkan “baik”. Dalam suatu program, apabila proses pelaksanaan telah terlaksana tentu diharapkan adanya hasil atau manfaat yang diperoleh sesuai

dengan harapan atau tidak, adan hal tersebut dapat dilihat pada indikator selanjutnya, yaitu indicator penguatan (empowering) yang akan peneliti uraikan juga dibawah berikut ini.

2. Penguatan (Empowering)

Penguatan (empowering) yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri. Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar yaitu meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan mutu kemasan, manajemen pembukuan, manajemen pemasaran dan meningkatkan mutu label pada kemasan.

Hasil tanggapan responden yaitu masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Kampar pada indicator penguatan (empowering) yang akan dianalisa dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 4 item pertanyaan yang di isi 20 orang responden penelitian pada kapasitas penguatan (empowering) yang akan di analisa maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator penguatan (empowering) yang akan di analisa

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah	5 (25%)	12 (60%)	3 (15%)	20 (100%)
2.	Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri	7 (35%)	10 (50%)	3 (15%)	20 (100%)
3.	Memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis	8 (40%)	11 (55%)	1 (5%)	20 (100%)
4.	mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat diklola	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	20 (100%)

	atau digunakan dengan baik				
	1	2	3	4	5
Jumlah		25	46	9	100
Rata-rata		6	12	2	20
Persentase		30%	55%	20%	100%

Sumber: Olahan Peneliti 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat jawaban responden masyarakat tentang memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, bahwa responden menjawab baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 12 oarang atau dengan persentase 60%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan persentase 15%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup baik dalam memeberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, hal ini menunjukkan bahwa proses penguatan (empowering) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian respon masyarakat tentang mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri responden yang menjawab baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase 35%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 10 orang atau dengan persentase 50%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan persentase 15%, jadi rata-rata masyarakat menjawab cukup baik dalam mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, hal ini menunjukkan bahwa proses penguatan (empowering) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, berdasarkan indicator mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Selanjutnya jawaban responden masyarakat tentang memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, responn yang menjawab baik sebanyak 8 orang atau dengan persentase 40%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 11 oarang atau dengan persentase 55%, dan yang menjawab

kurang baik sebanyak 1 orang atau dengan persentase 5%, jadi rata-rata jawaban masyarakat menjawab cukup baik dalam hal memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, hal ini menunjukkan bahwa proses penguatan (empowering) sudah diterapkan tetapi belum terlaksana dengan baik.

Dan jawaban masyarakat mengenai mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik, responden yang menjawab baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 13 orang atau dengan persentase 65%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau sebanyak 10 %, jadi rata-rata masyarakat menjawab cukup baik dalam hal mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa proses penguatan (empowering) sudah diterapkan tapi belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari jawaban responden masyarakat diatas tentang penguatan (empowering) yang diterapkan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar rata-rata responden menjawab baik sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebanyak 30%, kemudian masyarakat yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang atau dengan persentase 55%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan persentase sebanyak 20%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden masyarakat menyatakan cukup baik namun belum terlaksana dengan baik atas penguatan (empowering) yang diterapkan. Hal ini mengatakan bahwa penguatan (empowering) dalam memberikan pembinaan pengetahuan terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan bapak sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK mewakili Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK yaitu bapak Purwadi, SP., M.Si (3 Desember 2018) menyatakan bahwa : “ Dari segi penguatan (empowering) untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ketika mengalami kendala dalam kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat

Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh kami sudah semaksimal mungkin sehingga memudahkan masyarakat untuk mengelola kegiatan usaha secara ekonomis, dan berupaya memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tentang bagaimana cara meningkatkan proses pemasaran “ .

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UMK yaitu bapak H. Ibrahim, S.Pd ., M.Si (3 desember 2018) menyatakan bahwa : “ bahwa dalam proses penguatan (empowering) yang kami lakukan sudah cukup maksimal yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat tersebut .

kemudian hasil wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Promosi dan Peluang Usaha yaitu Ibu Elli Yudia, S.E (3 Desember 2018) menyatakan bahwa : “ dalam hal memberikan pengetahuan kepada masyarakat kami telah melakukan yang terbaik yaitu dengan cara sering melakukan pelatihan terhadap masyarakat tentang pengembangan usaha selain itu juga kami membantu masyarakat dalam hal pemasaran dengan mempromosikan produk-produk yang di hasilkan oleh pelaku usaha melalui pameran-pameran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilihat dari indicator penguatan (empowering) yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK masih ditemukan bahwa kurangnya pelatihan yang diberikan pada pelaku usaha sehingga masih ada kualitas produk yang kurang baik , contohnya masih adanya kemasan atau label pada makanan yang tidak bagus dikarenakan kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang dimiliki untuk memperbaiki kualitas produk pada usaha mikro di Kabupaten Kampar.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan juga hasil wawancara dari beberapa key informan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan yang dinilai dari penguatan

(empowering) data disimpulkan “cukup baik” namun belum terlaksana dengan baik. Setelah adanya pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat, tentu akan ada akibat yang ditimbulkan baik itu positif atau negative dari setiap program pembinaan yang dilakukan dari poses penguatan (empowering), dan hal tersebut dapat dilihat pada indicator selanjutnya yaitu indicator perlindungan (protecting) yang akan peneliti uraikan juga di bawah ini yaitu sebagai berikut.

3. Perlindungan (Protecting)

Perlindungan (protecting) yaitu harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat yang lemah, sehingga menghilangkan bentuk diskriminasi dan dominasi. Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dalam kegiatan perlindungan yaitu dengan cara tidak membeda-bedakan setiap masyarakat yang memiliki latar belakang usaha yang berbeda-beda, selain itu dinas Perdagangan Koperasi dan UMK juga melakukan kegiatan pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

Hasil tanggapan responden yaitu masyarakat pengelola Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada indicator perlindungan (protecting) yang akan dianalisis data di lihat pada tabel berikut ini, dari 4 item pertanyaan yang di isi 20 orang responden penelitian pada kapasitas perlindungan (protecting) yang akan dianalisis maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel V.6 : Tanggapan Respoden Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dari Indktor perlindungan (protecting) yang akan di analisis

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.	5 25%	13 65%	2 10%	20 100%
2.	Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi	6 30%	10 50%	4 20%	20 100%

	yang dialami masyarakat lemah				
3.	Memberikan pengawasan sampai pada saat memetik hasil	5 25%	11 55%	4 20%	20 100%
4.	Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dinilai ekonomis	7 35%	12 60%	1 5%	20 100%
Jumlah		23	46	11	100
Rata-rata		6	11	3	20
Persentase		30%	55%	15%	100%

Sumber: Olahan Peneliti 2018

Pada tabel V.7 diatas dapat dilihat jawaban responden masyarakat tentang memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, bahwa responden menjawab baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25% , kemudian yang menjawab Cukup baik sebanyak 13 orang atau dengan persentas 65%, dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 2 orang atau dengan persentase 10%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup baik dalam memberika perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, hal ini menunnjukan bahwa proses perlindungan (pertecting) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban respon masyarakat tentang menghilangkan segala bentuk distriminasi dan dominasi yang dialami yang dialami masyarakat lemah, responden yang menjawab baik sebanyak 6 orang atau dengan persentase 30%, kemudian yang menjawab Cukup baik sebanyak 10 orang atau dengan persentase 50%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan persentase 20%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup baik dalam hal menghilangkan diskriminasi masyarakat lemah, hal ini menunjukan bahwa proses perlindungan (protecting) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik,

berdasarkan indikator menghilangkan segala bentuk indikator diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah.

Selanjutnya jawaban responden masyarakat tentang memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil, responden yang menjawab baik sebanyak 5 orang atau dengan persentase 25%, kemudian yang menjawab kurang baik sebanyak 11 orang atau dengan persentase 55% dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan persentase 20%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup baik dalam memberikn pengawasan sampai tahap memetik hasil, hal ini menunjukkan bahwa proses perlindungan (protecting) sudah diterapkan tapi belum terlaksana dengan baik.

Dan jawaban responden masyarakat tentang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis, responden yang menjawab baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase 35%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 12 oarang atau dengan persentase 60% , dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 oarang atau dengan persentase 5% . jadi rata-rata responden menjawab cukup baik dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis, hal ini menunjukkan bahwa proses perlindungan (protecting) sudah diterapkan, namum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari jawaban responden masyrakat diatas tentan perlindungan (protecting) yang diterapkan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabuapten Kampar rata-rat responden menjawab baik sebanyak 6 orang atau dengan persentase 30%, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang tau dengan persentase 55%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan persentase 15%, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup baik namun belum terlaksana dengan baik atas perlindungan (protecting) yang diterapkan. Hal ini mengatakan bahwa

perlindungan (protecting) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat pelaku usaha mikro cukup baik, namun belum terlaksana dengan baik.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Mewakili Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Bapak Purwadi, S.P., M.Si menyatakan : “bahwa perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang kami lakukan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan cara tidak pernah membatasi masyarakat untuk dapat berkembang sehingga usahanya dapat maju, selain itu kami juga melakukan kegiatan yang bersifat terbuka tanpa ada perbedaan dengan pengusaha-pengusaha lain “ .

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan UMK Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar yaitu bapak H.Ibrahim, S.Pd., M.Si, menyatakan bahwa : “ setiap kegiatan yang kami lakukan kepada masyarakat pengelola usaha mikro kecil khususnya dari segi perlindungan yang kami lakukan yaitu mulai dari memberikan pelatihan , pengarahan serta bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas kami rasa tase sudah cukup maksimal”.

Kemudian hasil wawancara dengan seksi Pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha yaitu Ibu Elli Yudia, S.E (3 Desember 2018) menyatakan bahwa : “ Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dari segi perlindungan yaitu pada saat melakukan pembinaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan kami selalu melakukan pengawasan dan monitoring setiap dilaksanakannya suatu kegiatan pembinaan tersebut, dan yang kami lakukan sudah dengan ketentuan yang ada”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari indikator perlindungan (protecting) yaitu melindungi masyarakat lemah sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dilakukan oleh pihak Dinas yaitu dengan cara mempromisikan produk ke luar

daerah belum dilaksanakan dengan baik dilihat dari hasil penjualan yang kurang diakibatkan kurangnya pengawasan dan promosi ke daerah lain.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan juga hasil wawancara dengan beberapa key informan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan yang dinilai dari perlindungan (protecting) dapat disimpulkan “cukup baik” namun belum terlaksana dengan baik. Setelah adanya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan cara menghilangkan bentuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat yang lemah sehingga tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat diukur melalui indikator perlindungan (protecting).

Berdasarkan tabel V.7 di atas juga berdasarkan observasi peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Kampar terhadap indikator perlindungan (Protecting) yang ada dalam penelitian ini yaitu berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 55% dari jumlah keseluruhan. Kategori program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sudah mengakibatkan perubahan terhadap masyarakat yang mengikuti program pembinaan namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ukuran baik atau tidaknya yang ditimbulkan dari suatu program dapat ditinjau dari suatu program sehingga adanya perubahan kualitas hidup menjadi lebih baik dar sebelumnya. Dalam hal ini, pembinaan yang diberikan kepada masyarakat memang menjadikan masyarakat berfikir lebih maju dan kreatif sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan terus berkembang.

Kemudian wawancara yang peneliti lakukan dengan tiga (3) orang informan dan pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar yang dianggap mengetahui dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen kewirausahaan setiap tahunnya tersebut digunakan sebagai data pelengkap dan penguat

pernyataan dan tanggapan responden pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK selaku pelaksana kegiatan pemberdayaan. Dengan dilakukannya wawancara, maka peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam mengenai kegiatan pembinaan manajemen kewirausahaan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dari mana anggaran yang digunakan berasal, bagaimana manfaat serta dampaknya, serta apa saja kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan dan pegawai akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dipahami maksudnya.

Tabel V.7 : Hasil Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK mewakili Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Bapak Purwadi, S.P., M.Si Mengenai Pemberdayaan UMK Kabupaten Kampar.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban Key Informan / Responden
1	2	3
1.	Apakah program kerja Dinas sudah disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Kampar ?	Program kerja Dinas itu selalu di sesuaikan dengna visi dan misi Kabupaten karena program kerja selalu mengikuti visi misi bupati terpilih. Jadi sudah pasti bahwa program kerja Dinas di sesuaikan dengan visi misi daerah
2.	Apakah setiap tugas yang embankan kepada bawahan sudah menurut ke ahlian dan kemampuan pegawai bagian usaha mikro kecil ?	Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK disini kami memiliki pejabat eselon 3 sebanyak 5 orang, dan pada saat ini bidang Pemberdayaan UMK di ketua oleh pejabat eselon 3 yang sudah berpengalaman dibidang pemberdyaan dan memiliki bawahan yang sudah berpengalaman pula di bidang usaha mikro kecil
3.	Apakah setiap tugas/perintah yang bapak berikan kepada bawahan bagian UMK sudah melakukan	Kami memiliki beberapa petugas yang bertugas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat contohnya seperti

	pembinaan kepada masyarakat dengan baik ?	PPKL (petugas penguluh koperasi lapangan) dan juga kami memiliki petugas PLUT (pusat pelayanan usaha terpadu) yang siap memberikan pembinaan kepada masyarakat
4.	Apakah bapak mengalami kesulitan pada saat melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai ?	Iya, setiap individu memiliki karakteristik masing-masing soal kedisiplinan masih menjadi permasalahan utama, tetapi sampai saat ini kami belum mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan kedisiplinan pegawai
5.	Apakah pembinaan UMK yang dilakukan kepada masyarakat sejauh ini terlaksana dengan baik?	Sejauh ini kami belum menemukan kendala yang berarti semua berjalan pelan-pelan, dan pada saat ini kami sedang mengurus dan membina bagaimana agar usaha mikro yang ada di Kabupaten Kampar ini dapat mengurus surat izin Usaha mikro kecil
6.	Siapakah masyarakat yang berhak mengikuti pembinaan UMK?	Masyarakat yang berhak mengikuti pemberdayaan UMK adalah masyarakat yang sudah mempunyai usaha
7.	Darimana dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan setiap tahunnya ?	Dana yang di gunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan terhadap UMK bersal dari APBD
8.	Apakah yang menjadi tugas bapak dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat tersebut?	Memberikan pelatihan, memberikan informasi serta memberikan pembinaan dengan harapan usaha mikro kecil yang ada dapat lebih maju dan berkembang, sesuai dengan program bupati Kampar yaitu dapat mengekspor hasil dari UMK.
9.	Apakah bawahan bapak sering	Jika berbicara soal kendala tidak di

	mengalami kendala dalam memberikan pembinaan/pengembangan dalam pengelolaan UMK?	pungkiri masih ditemui nya beberapa kendala tetapi sejauh ini bukn kendala yang berarti dan masih bisa untuk di tanggulangi.
10.	Apa yang biasa bapak lakukan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat yang mempunyai usaha ?	Sebagai Pembina, komunikasi ada hal yang wajib selain itu jugak kami memilki program kerja yaitu melakukan promosi atau pameran, baik itu pameran yang bertaraf regional, nasional maupun bertaraf local.
11.	Sosialisasi apa yang bapak lakukan kepada masyarakat untuk menunjang usahanya ?	Sebenarnya untuk sosialisasi pada tahun ini belum/tidak adanya dana untuk di lakukannya sosialisasi
12.	Apakah sejauh ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengelola usaha UMK sudah terlaksana?	Sejauh ini pelayan yang kami berikan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Sumber: *Olahan Peneliti 2018*

Tabel V.8 diatas menggambarkan percakapan antara peneliti dengan Sekretaris Dinas Perdagang koperasi dan UMK mewakili Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tentang pelaksanaan kegiatan Dinas tersebut dan program pembinaan terhadap masyarakat pelaku usaha kecil di Kabupaten Kampar. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data berupa tanggapan yang lebih akurat dari Bapak Sekretaris, yaitu Bapak Purwadi, S.P ., M.Si dan isi wawancara seperti peneliti cantumkan di atas agar dapat dipahami maksudnya serta mampu menggambarkan kosndisi di lapangan. Isi wawancara yang dilakukan peneliti sesuaikan dengan indicator penelitian yang digunakan. Kemudian untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala bagian Pemberdayaan UMK Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK sehingga bisa mengumpulkan tanggapan informan tersebut dalam waktu yang berbeda-beda. Dan

tanggapan dari Kepala Bidang Pemberdayaan UMK tersebut peneliti kemas dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel V.8 : Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pemberdayaan UMK Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, Bapak Ibrahim, S.Pd ., M.Si mengenai Pemberdayaan Masyarakat UMK Kabuapten Kampar.

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban Key Informan/Responden
1.	Apakah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas UMK mengalami kesulitan?	Tidak begitu sulit dikarenakan kerja sama antara pegawai dibidang UMK sangat erat
2.	Apakah dalam memberikan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Keil sudah terlaksana dengan baik?	Sudah, pelaku UMK sering diajak dalam mengikuti event-event dan penelitian yang di adakan Dinas.
3.	Apakah setiap rencana atau program pembinaan UMK mengalami kesulitan dalam melaksankannya?	Kesulitan yang dialami yaitu mengatur waktu kunjungan ke UMK, terkadang PUMK sulit untuk di temui
4.	Apakah setiap rencana atau program pembinaan UMK harus di setujui oleh atasan terlebih dahulu?	Iya, karena korDinasi dngan atasan itu sangat penting dalam suatu pekerjaan
5.	Apakah bapak sering melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan program pemberdayaan UMK	Sering, ketika ada pameran-pameran yang melibatkan UMK
6.	Apaka setiap arahan atau bimbingan yang diberikan kepada bawahan dapat terjalin dengan baik?	Terjalin dengan baik karena bawahan juga mudah untuk diajak kerja sama
7.	Factor-faktor apa saja yang menghambat kegiatan UMK?	Sulitnya mengatur waktu untuk melakukan pembinaan ke PUMK
8.	Apakah dengan adanya	Iya, karena bisa meningkatkan SDM

	pembinaan UMK dapat meningkatkan perekonomian daerah?	pelaku UMK
9.	Apakah setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat ada peran Dinas untuk mempromosikan ke daerah lain?	Sebagian ada, karena sering di ikutkan dalam acara pameran di luar daerah
10.	Apakah ada pengawasan pada saat kegiatan pengelolaan produk dilakukan?	Ada, kunjungan saat proses produksi
11.	Apakah ada kebebasan untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya sehingga bernilai ekonomis?	Bebas, sesuai dengan potensi dan SDM yang dimiliki

Sumber: olahan peneliti 2018

Tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa percakapan antara peneliti dengan kepala bidang pemberdayaan UMK mengenai pemberdayaan UMK di Kabupaten Kampar. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data berupa tanggapan yang lebih akurat dari bapak Ibrahim, S.Pd., M.Si selaku kepala bidang Pemberdayaan UMK Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan isi wawancara seperti yang telah dicantumkan di atas agar dapat dipahami maksudnya serta mampu menggambarkan kondisi dilapangan. Isi wawancara yang peneliti cantumkan sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu seperti pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), dan perlindungan (protecting) ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur proses kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Kemudian untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Pengembangan Promosi dan Peluang Usaha Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK sehingga peneliti biasa

mengumpulkan tanggapan informan tersebut dalam waktu yang berbeda-beda. Dan tanggapan tersebut peneliti kemas dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Hasil Wawancara dengan ibuk Kepala Seksi Pmeberdayaan Pengemangan, Promso dan Peluang Usaha Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, Ibuk Elli Yudia, S.E mengenai Pemberdayaan Masyarakat UMK Kabupaten Kampar.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban Key Informan/Responden
1.	Apakah kegiatan program pemberdayaan UMK dapat terlaksana setiap tahunnya ?	Bisa, selama anggaran dari Dinas terkait bisa diadakan
2.	Bagaimana system pengembangan usaha yang dilakukan?	Membantu dalam promosi, membantu dalam permodalan (pinjaman dengan suku bunga rendah)
3.	Dalam memberikan pemberdayaan UMK kiat-kiat apa aja yang sudah dlakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar?	Mengajak PUMK dalam event-event yang ada
4.	Apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kab. Kampar pernah melakukan sosailisasi entang pengembangan usaha?	Ada, dalam hal ini diadakan oleh konsulyan PLUT Kab. Kampar
5.	apakah setiap melkukan pemberdayaan UMK dilakukan pengelomokkan jenis usaha ?	Iya, pengelompokan berdasarkan jenis produk
6.	Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan pemberdayaan UMK?	Tidak adanya pembiyaan untuk melakukan pelatihann oemberdayaan UMK
7.	Pada saat melkukan pemberdayaan menurut ibuk permasalahanna apa yang sring dihadapi, dan apa solusi dari	Sebagau besar pelaku UMK mengeluhkan permasalahan permodalan. Dan solusi yang dilakukan memberikan pinjaman yang terjangkau bagi PUMK

	permasalahan tersebut?	
8.	Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembinaan yang diberikan?	Belum, karena pembinaan tidak diadakan secara berkelanjutan karena terkendala dana
9.	Apakah ada larangan untuk tidak menerima produk luar sehingga produk local lebih berkembang	Tidak ada, sehingga bisa jadi penghambat bagi produk lokal
10.	Apakah tugas pengawasan dan pembinaan pengembangan usaha sudah dilaksanakan dengan baik?	Belum, terkendala anggaran
11.	Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan UMK sudah memadai?	Belum, sumber dana dari APBD kurang
12.	Apakah setiap pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat setiap tahunnya dapat berkembang secara ekonomis?	Bisa, jika kegiatan pembinaan dilakukan berkelanjutan

Sumber: olahan peneitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar memang sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa hal yang mengakibatkan kurang optimalnya program tersebut, dan masing-masing pelaku usaha mikro kecil yang berbeda-beda saat pelaksanaan kegiatan pemerdayaan masyarakat tersebut. Berbagai kendala yang di ungkapan oleh para pegawai Dinas tersebut diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan program tersebut.

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

No	Item pernyataan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Pemungkinan (Enabling)	9 (45%)	7 (35%)	4 (20%)	20 (100%)
2.	Penguatan (Empowering)	6 (30%)	11 (55%)	4 (20%)	20 (100%)
3.	Perlindungan (Protecting)	6 (30%)	11 (55%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		21	29	11	61
Rata-rata		7	10	3	20
Persentase		(35%)	(50%)	(15%)	(100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel V.11 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indicator penguatan (enabling) yang menyatakan baik sebanyak 9 orang atau dengan persentase sebanyak 45%, yang menjawab cukup baik sebanyak 7 orang atau dengan persentase sebanyak 35% , yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan persentase 20%. Dengan alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar baik dalam memberikan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil.

Selanjutnya indicator penguatan (empowering) yang menyatakan baik sebanyak 6 oarang atau dengan persentase 30%, yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang atau dengan persentase 55%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan persentase 20%. Dengan alasan masyarakat menganggap Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sudah Cukup Baik dalam memberikan kagitan pembinaan dan pengembangan Usaha kepada Masyarakat peelaku Usaha Mikro kecil.

Selanjtnya indicator perlindungan (protecting) yang menyatakan baik sebanyak 6 orang atau dengan persentase 30%, yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang atau dengan persentase 55%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 oarang atau dengn

persentase sebanyak 15%. Dengan alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabuaoten Kampar Cukup Baik dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabuapten Kampar.

Maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabuapten Kampar dikatakan “Cukup Baik”, kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah diterapkan bahwa yang dikatakan katagori “Cukup Baik” dengan persentase 50% . karena masyarakat menganggap bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar “Cukup Baik” dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat pelaku usaha mikro kecil.

C. Faktor-Faktor penghambat Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Kopersi dan UMK Kabupaten Kampar.

Dari analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, antara lain yaitu :

1. Kurangnya pendanaan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Rendahnya sumberdaya manusia terutama pada masyarakat pelaku usaha mikro kecil
3. Kurangnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat pelaku usaha mikro kecil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan pembahasna pada bab-bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil Kabupaten Kampar oleh Dinas perdagangan koperasi dan UMK. Selain kesimpulan, juga ada saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan apabila akan melaksanakan program yang serupa sehingga bisa menjadi lebih baik, tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dilapangan yang tlah dilakukan dan analisi serta pembahasan dan hasil peneliti ini, maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Untuk indicator pemungkinan (enabling), hasil tanggapan responden masyarakat pengelola Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, juga termasuk wawancara dengan beberapa informan dan hasilnya termasuk dalam katagori “Baik” yang dengan jumlah 9 dengan perentase 45%. Katagori Baik ini bermakna pada indicator pemungkinan (enabling) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil Kabuapten Kampar sudah baik.
2. Untuk idniktor penguatan (empowering), hasil tanggapan responden masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Kampar, juga termasuk wawancara dengan beberapa informan dan hasilnya termasuk katagori “Cukup Baik” yang jumlah 11 orang denga persentase 55%. Hal ini berarti pada indicator penguatan (empowering) dari kegtan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil Kabupaten

Kampar sudah memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat namun belum sepenuhnya optimal. Ukuran optimal atau tidaknya suatu program dapat di tinjau dari tercapai atau tidanya tujuan diadakan program tersebut. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadikan usaha yang dikelola menjadi layak dan lebih baik dari sebelumnya untuk dapat didistribusikan tidak hanya di daerah local namun sampai keluar kota, sehingga dapat menurunkan angka kamiskinan yang juga merupakan salah satu tujuan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil Kabupaten Kampar.

3. Untuk indicator perlindungan (protecting). Hasil tanggapan responden masyarakat pelaku usaha mikro kecil Kabupten, juga termasuk wawancara dengan beberapa informan dan hasilnya termasuk katagori “Cukup Baik” yang berjumlah 11 oarang atau dengan prsentase 55% . dalam hal ini kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil menjadikan usaha tersebut menjadi layak dan lebih dari usaha –usaha sebelumnya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikn dalam peneitian mengenai Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaga Mikro Kecil Kabuaten Kampar pada kegiatan pembinaan manajemen kewiraysahaan , agar factor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegitan pemberdayaan tersebut dapat teratasidan pelaksanaan berikutnya dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah diterapkan pada saat perencanaan dapat tercapai dengan optimal, berikut ini adaah saran yang peneliti berikan kepada para aparat selaku pelaksana program serta masyarakat pelaku usaha mikro kecil:

1. Disarankan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK untuk tetap meningkatkan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar sehingga lebih berkembang dan maju.
2. Sebaiknya dilakukannya pengawasan setiap kegiatan pemberdayaan seperti melakukan pelatihan manajemen kewirausahaan usaha mikro kecil Kabupaten Kampar.
3. Diharapkan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil kabupaten Kampar mampu mengembangkan usahanya dan dapat terus berinovasi sehingga usaha yang dikelolanya dapat berkembang dan dapat mansejahterakan hidupnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Athoilah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Cetakan I. Pusataka Setia
- Danang, Sunyoto. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Pemansaran*. Yogyakarta: CAPS
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hanim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Uir press: Pekanbaru
- Hasibuan, Melayu. 2009. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Ceatakan Kedelapan, Bumi Askara: Jakarta
- . 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara.
- Ibrahim, Adam. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Bapenas.
- Manuwoto. 1998, *Peningkatan Pesan Serta Upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menuju masyarakat madani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2005. *Kybernologi: sebuah kontruksi Ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung.
- . 2003. *Kybernologi, sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung.
- Nawawi, Ismail, 2009. *Prilaku Administrasi Neagara*. Surabaya: Its Press

- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajamenen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gadjah Mada. Universitas Pres.
- Pranaka, A.M.W.danPrijiyono, Oni. 1996, *penyunting Pemberdayaan Konsep dan Implementasi*, Jakarta:Csis.
- Robins.P.Stephen. 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta:Arean.
- Salam, DharmaSetiawan. 2007,*Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambaran, Edisi Repisi
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2004. *filsafat Administrasi*. Jakarta, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sondang, Siagian P. 2003.*Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'I, Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pmerintahan Indonesia*. Bandung: Cv Mndar Maju.
- _____. 2004.*Ilmu Negara kajian ilmiah dan kegamaan*. Bandung:Pustaka Rineka Cipta.
- _____. 2011, *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa barat.
- _____. 2013, *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Sugiyono, Danang. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabel.Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian administrasi lengkap dengan metode R&D*. Bandun. Alfabeta.
- Terry, R George. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Terry, R Geoge. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Caeatakan Ke XIII. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Akasara.

Zulkifli,2005.*pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Uir press.
Pekanbaru.

Zulkifli,2009.*Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Uir Press.



Dokumentasi:

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja.

Skripsi Analisa Pemberdayaan Masyarakat UMK oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Indra Giri Hulu oleh Romauli tahun 2015.

Skripsi Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupetn Rokan Hilir dalam Pemberdayakan Nelayan Kecil pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Kampar oleh Yusuf Anuari tahun 2015.

